



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FEDERALISME DI RUSIA DITINJAU DARI KEBIJAKAN  
DIKTATOR HUKUM VLADIMIR PUTIN (2000-2008) DALAM  
PENUNJUKAN KEPALA EKSEKUTIF SUBJEK FEDERASI**

**SKRIPSI**

**EDWARD CONSTANTINE  
NPM 0705120189**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI RUSIA  
DEPOK  
JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FEDERALISME DI RUSIA DITINJAU DARI KEBIJAKAN  
DIKTATOR HUKUM VLADIMIR PUTIN (2000-2008) DALAM  
PENUNJUKKAN KEPALA EKSEKUTIF SUBJEK FEDERASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora**

**EDWARD CONSTANTINE**

**NPM 0705120189**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI RUSIA**

**SEJARAH**

**DEPOK**

**JUNI 2010**

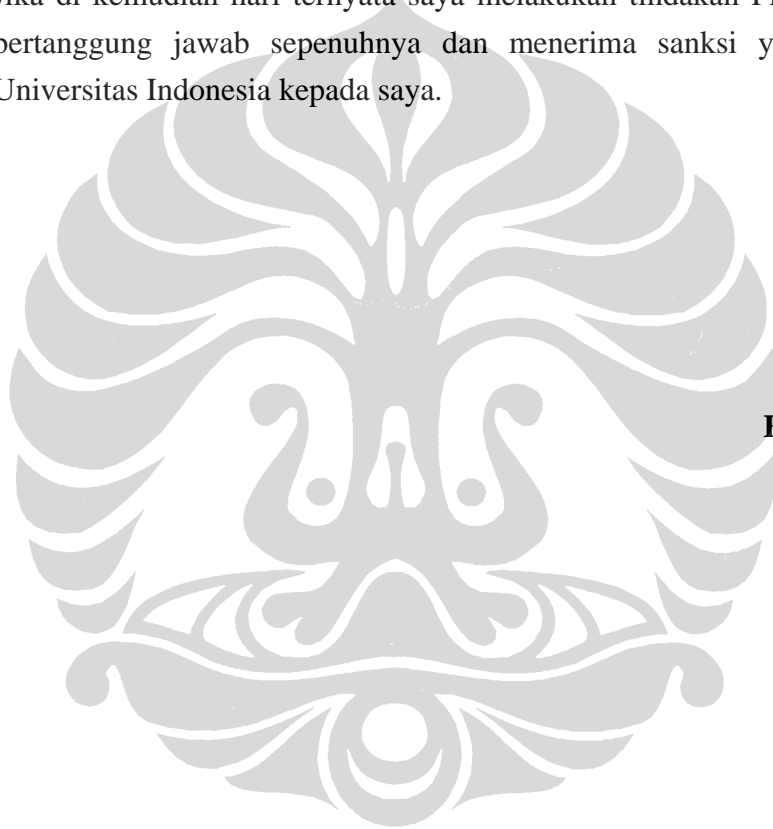
## **HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok, 23 Juni 2010**

**Edward Constantine**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

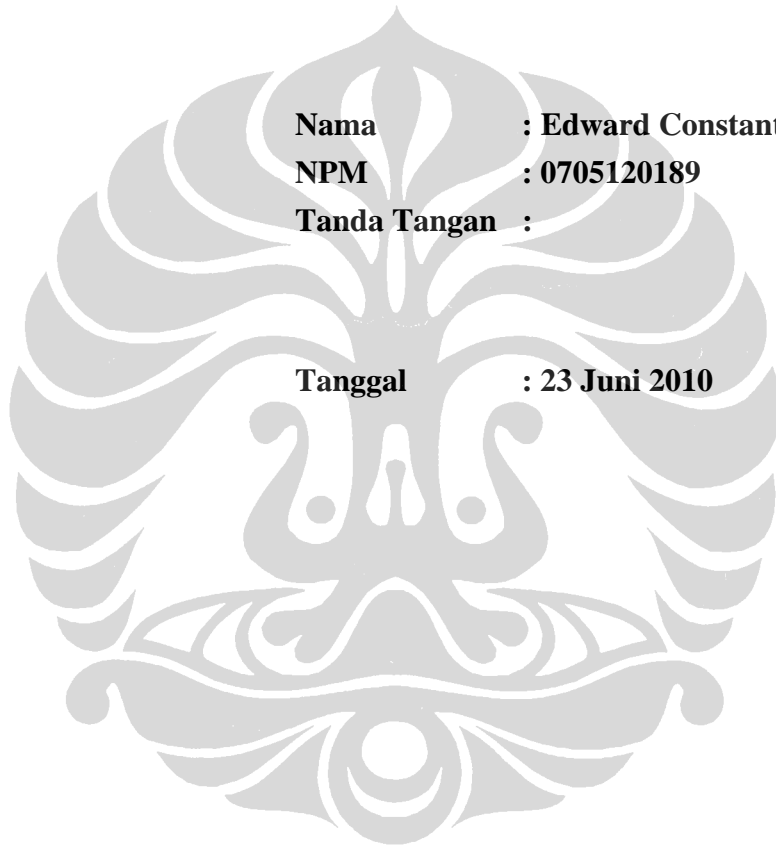
**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Edward Constantine**

**NPM : 0705120189**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 23 Juni 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Edward Constantine  
NPM : 0705120189  
Program Studi : Rusia  
Judul Skripsi : Federalisme di Rusia Ditinjau dari Kebijakan Diktator  
Hukum Vladimir Putin dalam Penunjukkan Kepala  
Eksekutif Subjek Federasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mina Elfira, M.A, Ph.D.

Pembaca I : Ahmad Fahrurodji, M.A

Ketua Sidang : Dr. Zeffry Alkatiri

Ditetapkan di : Fakultas Ilmu Pengetahuan Ilmu Budaya, Depok

Tanggal :

oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 196510231990031002



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Constantine  
NPM : 0705120189  
Program Studi: Rusia  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Federalisme di Rusia Ditinjau dari Kebijakan Diktator Hukum Vladimir Putin dalam Penunjukkan Kepala Eksekutif Subjek Federasi

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang menyatakan

(Edward Constantine)

## KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME atas perlindungan, berkat, dan rahmat-Nya yang telah memberi penulis kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Rusia pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, akan menjadi sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Dr. Bastian Simanjuntak dan Elizabeth Eda yang sampai saat ini selalu memberi dukungan dan juga bantuan moril dan materiil selama penulis hidup. Tidak lupa juga untuk adik penulis Putri Eliza.

Terima kasih juga penulis ucapkan untuk Ibu Mina Elfira, M.A, Ph.D, selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Kemudian, kepada jajaran pengajar program studi Rusia FIB UI yang mendidik penulis selama ini, yakni, Bapak Ahmad Sujai, M.A, Ibu Sari Endah Warni, M.Si, Bapak Bangas Limbong, M.A, Bapak Alm. Dr. Singkop Boas Boangmanalu, Ibu Prof. DR. N.Jenny, Bapak M. Nasir Latief, M.A, Ibu Thera Widyastuti M. A, Ibu Nia Kurnia Sofiah, M.App. Ling, Bapak Dr. Zeffry Alkatiri, Bapak Ahmad Fahrudodji, M.A, Reynaldo. D. Archellie, S.Hum, Hendra Kaprisma, S.Hum.

Terima kasih juga kepada Bapak Purnawidi, S.H, Bapak Ari Wahyudi Hertanto, S.H, M.H, dan Fernando Manullang, S.H (bang Nando) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu memberikan pemahaman kepada penulis mengenai teori federalisme dan ketatanegaraan secara umum.

Terima kasih juga untuk Gemala Citra yang selalu meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan dukungan moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan dalam skripsi; Rieke, Wishnu, Nico, Bia, Deny. Kemudian kepada teman-teman seangkatan 2005: Dimas, Aci, Nasya, Echa, Ayu, Domdom, Dinda,

Citra, Lia, Sany, Utty, Siffa, Lydia, Lusy, Shella, Wita, Rahman, Fachri, Aul, Moko, Said, Bagus. Junior dan teman-teman seperjuangan angkatan 2006: Mare, Wendy, Yayah, Vidy, Key, Christy, Dewi, Jena, Anggi, Adis, dan Darto, junior angkatan 2007: Tasya, Tata, Eko, Ais, Dipta, Mega, Ninda, Raisha, Delvy, Beny, dll, junior angkatan 2008: Ferdi, Jhon, Tama, Aji, Riga, Feby, Olga, Gie, Danti, dll, junior angkatan 2009: Ati, Sinta, Shebi, Esti, Rani, Akbar, Erik, Feby, Chandra, dll.

Khususnya kepada teman-teman yang selama ini membantu dan memberikan saran-saran, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dukungan moril yang berguna bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yakni Dimas (05), Mare (06), Rieke (05), Wishnu (05), Ais (07), Ferdi (08), John Aldi (08).

Terima kasih juga kepada teman-teman program studi belanda angkatan 2004: Fajar, Udjo, Farid, James, Billy dan angkatan 2007: Wangi, Rengga, yang juga turut memberikan dukungan moril selama ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun. berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Depok 23 Juni 2010

Edward Constantine



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Pernyataan bebas Plagiarisme.....  | i         |
| Halaman pernyataan Orisinalitas.....   | ii        |
| Halaman pengesahan.....  | iii       |
| Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis..... | iv        |
| Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih.....  | v         |
| Abstrak.....   | vii       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan .....   | 5         |
| 1.3 Batasan Masalah.....   | 5         |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....  | 5         |
| 1.5 Metode Penelitian.....   | 6         |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....   | 7         |
| <b>BAB 2 TEORI FEDERASI .....</b>  | <b>8</b>  |
| 2.1 Sejarah Federasi .....   | 8         |
| 2.2 Federasi sebagai Salah Satu Bentuk Bangunan Negara .....                         | 9         |
| 2.2.1 Kesatuan ( <i>Unitary</i> ).....   | 10        |
| 2.2.2 Konfederasi ( <i>Confederation</i> ).....                                      | 10        |
| 2.2.3 Federasi ( <i>Federation</i> ) .....   | 12        |
| 2.3 Hubungan Bentuk Negara Kesatuan,<br>Konfederasi dan Federasi .....               | 14        |
| 2.4 Federalisme .....  | 20        |
| <b>BAB 3 ANALISIS.....</b>   | <b>21</b> |
| 3.1 Federasi di Rusia Berdasarkan Konstitusi 1993 .....                              | 21        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.1.1 Subjek Federasi .....  | 30        |
| 3.2 Konsep Federalisme Rusia pada Masa<br>Kepemimpinan Boris Yeltsin .....                   | 31        |
| 3.2.1 Kekuasaan Garis Vertikal Yeltsin terhadap<br>Kepala Eksekutif di Subjek Federasi ..... | 33        |
| 3.3 Konsep Federalisme Rusia pada Era Vladimir Putin .....                                   | 36        |
| 3.3.1 Tradisi Kekuasaan .....  | 36        |
| 3.3.2 Kediktatoran Hukum .....   | 38        |
| 3.3.3 Kekuasaan Garis Vertikal Putin terhadap<br>Kepala Eksekutif Subjek Federasi .....      | 48        |
| <b>BAB 4 KESIMPULAN</b> .....  | <b>57</b> |
| <b>DAFTAR REFERENSI</b> .....  | <b>60</b> |

## ABSTRAK

Nama : Edward Constantine  
Program Studi : Rusia  
Judul : Federalism di Rusia Ditinjau dari Kediktatoran Hukum Vladimir Vladimirovich Putin dalam Penunjukkan Kepala Eksekutif Subjek Federasi

Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat tema federasi dan konsep federalisme Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin. Penulis menggunakan teori federasi untuk menganalisis bentuk federasi dan konsep federalisme di Rusia. Konsep federalisme Rusia juga dilihat dari kekuasaan vertikal pemerintah federal terhadap pemerintah subjek federasi. Kediktatoran hukum Putin turut mempengaruhi kuatnya kekuasaan vertikal pemerintah federal atas pemerintah subjek federasi dalam praktek kenegaraan. Hal ini akan menentukan konsep federalisme Rusia dengan munculnya kebijakan Putin tersebut.

Kata kunci:

Federalisme, Federasi, Kediktatoran Hukum, Kekuasaan Vertikal, Putin

## ABSTRACT

Name : Edward Constantine

Study Program : Russia

Title : Federalism in Russia From Vladimir Putin's Dictatorship of Law on the Selection of Executive Head of the Federation Subject

The study aims to explore the theme of federation and the concept of Russian federalism in the governance of Vladimir Vladimirovich Putin. The author use the theory of federation to analyze the form of federation and the concept of federalism in Russia. The concept of Russian federalism also can be seen from the vertical power of federal government on the federation's subject government. The dictatorship of Putin's law influenced the vertical power of federal government on the federation's subject government as well in practice. This will decide the concept of Russian federalism from the appearance of Putin's authority.

Keywords:

Federalism, Federation, Dictatorship of Law, The Vertical Power, Putin

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Negara sebagai suatu ikatan satu bangsa dan organisasi kewibawaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun sebuah negara harus memiliki kehendak dan tujuan yang akan menjadi suatu arah dan landasan dari masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Maka tujuan dan kehendak dari setiap negara sangat berpengaruh dalam menentukan struktur organisasi negara tersebut (dikutip dari Padmo Wahjono, 1996). Struktur organisasi negara berbicara mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Federasi adalah salah satu jenis bentuk negara. Hal yang membedakan antara bentuk federasi dengan bentuk bangunan negara lainnya adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah bukan sebagai bawahan dari pemerintah pusat melainkan kedua-duanya adalah pemerintahan masing-masing yang berdaulat. Namun pada praktiknya, bentuk federasi di setiap negara memiliki variasi atau bahkan penyimpangan, sehingga tidak ada dua negara berbentuk federasi di dunia ini yang sama persis (dikutip dari Miriam Budiardjo, 1992).

Rusia pasca bubarnya Uni Soviet adalah salah satu negara yang juga memiliki bentuk negara federasi. Berbagai faktor seperti keterpurukan ekonomi akibat sistem ekonomi komando dan penghabisan biaya perang dalam era perang dingin adalah faktor yang memicu percepatan bubarnya Uni Soviet. Namun salah satu kebijakan Gorbachev mengeluarkan *perestroika*<sup>1</sup> dalam upaya menyelamatkan Uni Soviet dari kehancuran ekonomi, justru berdampak besar bagi reformasi sosial yang besar di Uni Soviet yang diawali dengan kebebasan ekonomi, budaya dan politik. Pemberontakan di daerah-daerah kekuasaan Uni Soviet akibat kebijakan tersebut tentu saja mempercepat disintegrasi negara-negara satelit Uni Soviet tersebut. Bahkan sebelum bubarnya Uni Soviet ternyata negara-negara pecahannya membuat suatu konfederasi yang bernama *CHI*

---

<sup>1</sup> Perestroika: Restrukturisasi ekonomi, salah satu kebijakan yang memperkenalkan Uni Soviet kepada mekanisme ekonomi pasar, yang mengarah kepada kapitalisme modern. Dr. Nirajan M. Khilnani, *Emergence of New Russia*. New Delhi: Anmol Publication, hlm 129.

(*Содружество Независимых Государств /Sodruzhestvo Nezavisimyx Gosudarstv/*)<sup>2</sup>, atau disebut Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, sebagai bentuk kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan antar negara bekas pecahan Uni Soviet, yang menjamin kedaulatan (ekstern dan intern) negaranya masing-masing, seperti bentuk konfederasi.<sup>3</sup>

Boris Yeltsin menggunakan kesempatan ini untuk mendeklarasikan Rusia sebagai negara baru yang berdaulat penuh. Hal ini dapat dilihat pada konstitusi Federasi Rusia bagian pertama, bab satu, pasal satu:

*“Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.”*

*/Rossijskaya Federaciya – Rossiya est' demokraticeskoe federativnoe pravovoe gosudartvo s respublikanskoy formoy pravleniya/*

*“Federasi Rusia – Rusia adalah negara hukum yang federasi dan demokratis dengan bentuk pemerintahan republik.”*<sup>4</sup>

Dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin sebagai presiden pertamanya, Rusia berupaya menuju kepada sebuah sistem negara republik yang demokratis dan memilih bentuk federasi sebagai bentuk negaranya.

Begitu pula konstitusi Rusia yang mengarah demokratis terlihat dari adanya pemisahan kekuasaan di negara federal menjadi tiga bagian, yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>5</sup> Posisi eksekutif dipegang oleh presiden.

<sup>2</sup> *Содружество Независимых Государств /Sodruzhestvo Nezavisimyx Gosudarstv/* ‘Persemakmuran Negara-Negara Merdeka’ adalah bentuk konfederasi dari negara-negara bekas jajahan Uni Soviet yang persetujuan pendiriannya ditandatangani oleh para pemerintah Belarus, Federasi Rusia, dan Ukraina pada tanggal 8 Desember 1991 di Viskuly. Pada tanggal 21 Desember 1991, sebelas negara berdaulat bekas jajahan Uni Soviet menandatangani yaitu Republik Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Moldova, Federasi Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Ukraina <<http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=174>>, diakses pada 30/05/2010, pada pukul 20.53

<sup>3</sup> Konfederasi/perserikatan Negara: Gabungan beberapa Negara yang merdeka dan berdaulat penuh atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, namun tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu. Prof. Miriam Budiardjo. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet 14. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 139.

<sup>4</sup> *Конституция Российской Федерации*. <<http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm>>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2010 pada pukul 22.17.

<sup>5</sup> Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “*L’Esprit des Lois*” (1748), membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan yang tertinggi, kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang menghakimi pelanggaran undang-undang. Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ed 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm 283.

Sementara badan legislatif terbagi menjadi dua kamar, yaitu *duma* sebagai majelis rendah dan dewan federasi (*совета федерации*) sebagai majelis tinggi, seperti yang dituliskan dalam konstitusi Federasi Rusia bagian satu, bab lima, pasal sembilan puluh empat dan pasal sembilan puluh lima. Pada pasal sembilan puluh empat tertulis:

*“Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом Российской Федерации.”*<sup>6</sup>

/Federal'noe Sobranie – parlament Rossijskoj Federacii – yavlyaetsya predstavitel'nym i zakonodatel'nym organom Rossijskoj Federacii./

“Majelis Federal – parlemen Federasi Rusia – akan menjadi perwakilan dan badan legislatif Federasi Rusia.”

Pada pasal sembilan puluh lima poin pertama tertulis:

*“Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.”*<sup>7</sup>

/Federal'noe Sobranie sostoit iz dvux palat – Soveta Federacii i Gosudarstvennoj Dumy./

“Majelis Federal terdiri dari dua kamar – Dewan Federasi dan *Duma* Negara”

Sedangkan lembaga yudikatif dipegang oleh kehakiman dimana sistem peradilan Rusia terdiri dari mahkamah konstitusi Federasi Rusia, yurisdiksi pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan arbitrase.<sup>8</sup> Mahkamah konstitusi dalam Federasi Rusia berfungsi sebagai penengah jika ada sengketa antara eksekutif dan legislatif, dan sengketa pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian ataupun antar negara bagian yang satu dengan yang lainnya. Pemisahan kekuasaan antar organ negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dapat dicampuri lembaga yang satu dengan yang lainnya dalam hal kewenangan masing-masing lembaga, karena badan-badan itu berdiri sendiri (otonom). Namun pada kenyataannya, sejarah mencatat bahwa dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Rusia berdasarkan konstitusi 1993, badan legislatif memiliki kekuatan yang lemah dibanding dengan badan eksekutifnya dalam

<sup>6</sup> *Конституция Российской Федерации. Оп. Cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Russian Federation* <<http://www.traveldocs.com/ru/govern.htm>> diakses pada 17 Januari 2010 pada pukul 14.30

sistem ketatanegaraan Federasi Rusia pasca bubarnya Uni Soviet. Boris Yeltsin sejak awal telah memperkuat posisinya dimana ia bisa membubarkan *duma* negara, sesuai dengan konstitusi.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan keadaan *duma* negara pada waktu itu yang didominasi oleh Partai Komunis dan percobaan kudeta yang dilakukan oleh *duma*.

Periode Vladimir Putin telah membawa pengaruh bagi hubungan garis vertikal antara eksekutif federal dengan eksekutif konstituen. Banyak juga perubahan yang dilakukan, dalam hal pembagian wewenang dalam badan-badan negara federal hingga kecenderungan menguatkan otoritas pusat terhadap otoritas di daerah. Praktek-praktek kenegaraan yang memperlihatkan kecenderungan penguatan itu tampak berjalan di atas wadah sebuah negara federal.

Salah satu kebijakan Vladimir Putin yang terkenal adalah kebijakan diktator hukum (*dictatorship of law*).<sup>10</sup> Kebijakan ini dimaksudkan sebagai tertib hukum yang lebih dititikberatkan untuk menjerat tindak korupsi oleh kaum oligarkhi yang mendapatkan keleluasaan dan monopoli dalam bidang ekonomi pada masa Boris Yeltsin. Namun dalam kaitannya dengan kekuasaan seorang presiden (eksekutif), kebijakan diktator hukum memberi kewenangan presiden untuk melakukan sentralisasi dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga hal ini berdampak pada sistem pemilihan kepala eksekutif di setiap subjek federasi (*субъекты Российской Федерации*)<sup>11</sup> yang mendapat campur tangan Putin, yang jauh berbeda dengan sistem pemilihan kepala eksekutif subjek federal pada masa Boris Yeltsin. Kebijakan diktator hukum yang diberlakukan Vladimir Putin jauh

<sup>9</sup> A. Fahrurudji. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm 195-196

<sup>10</sup> *Dictatorship of Law*: Sebuah kebijakan tertib hukum yang diberlakukan Vladimir Putin, yang berarti bahwa aturan hukum yang kuat, digunakan untuk membangkitkan dominasi kapasitas administrasi negara. Sedangkan kediktatoran digunakan untuk pemulihan kapasitas administrasi negara tanpa munculnya aturan hukum, atau kesewenang-wenangan yang kuat. Vladimir Gel'man, "The Dictatorship of Law in Russia: Neither Dictatorship, Nor Rule of Law", PONARS Policy Memo 146, European University at St. Petersburg, Oktober 2000. <[http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm\\_0146.pdf](http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0146.pdf)>

<sup>11</sup> Subjek federasi: negara-negara konstituen Federasi Rusia. *субъекты Российской Федерации: входящие в состав Российской Федерации республики (государства), национально-территориальные (автономные) государственные образования - автономная область, автономный округ, территориальные образования - края, области, города федерального значения. РФ как федерация состоит из 21 республики. 6 краев, 49 областей, 2 городов федерального значения, 1 автономной области. 10 автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации*. <[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_law/2176/](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2176/)>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 05.26



dari prinsip-prinsip federalisme, meskipun federasi telah digunakan sebagai bangunan negara di Rusia. Namun seluruh kebijakan Putin pada umumnya dan khususnya kebijakan diktator hukum dalam memilih kepala eksekutif subjek federasi mungkin dapat dipandang sebagai suatu variabel dalam praktik kenegaraan sebuah negara federasi yang berlaku di Rusia pada era Putin.

Melalui pemaparan di atas, nampak adanya gejala sentralisasi federalisme dalam penunjukan kepala eksekutif subjek federasi pada era kepemimpinan Vladimir Putin tahun 2000-2008. Penulis tertarik untuk menganalisa kebijakan diktator hukum Vladimir Putin yang memiliki kaitannya dalam pemilihan kepala eksekutif setiap subjek federasi, sebab kajian tentang federalisme yang ditinjau dari kebijakan diktator hukum Vladimir Putin dalam kaitannya dengan penunjukan kepala eksekutif setiap subjek federasi periode Putin selama ini belum dibahas secara mendalam. Penulis berharap skripsi ini dapat melengkapi karya-karya yang telah ada sebelumnya.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Dalam skripsi ini penulis ingin mengajukan permasalahan tentang apa dan bagaimana konsep federalisme dan sistem federasi di Rusia pada pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin jika dilihat dari kebijakan diktator hukumnya dalam menunjuk kepala eksekutif subjek federasi.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini penulis membatasi masalah hanya pada konsep federalisme dan sistem federasi yang seperti apa Rusia di era Vladimir Putin jika dilihat dari perspektif kebijakan diktator hukum dalam menunjuk kepala eksekutif subjek federasi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai konsep federalisme di Rusia ditinjau dari kebijakan diktator hukum Vladimir Putin dalam menunjuk kepala eksekutif subjek federasi dengan proses analisa atas berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan.

## 1.5 Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Secara umum deskriptif-analitis disini dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan keadaan dari data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber untuk selanjutnya seobjektif mungkin dilakukan interpretasi dengan melakukan perbandingan dan pelengkapan dari berbagai sumber yang didapat.

Dalam mengubah data dan informasi yang diperoleh dari sumber menjadi sejarah sebagai kisah maka dibutuhkan suatu perangkat atau prinsip-prinsip dasar yang sistematis yang disebut dengan metode sejarah. Menurut Luis Gottschalk, metode sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik sumber) dengan menenmpuh cara itu, disebut historiografi.<sup>12</sup> Menurut Erns Bernheim dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie*, 1889 dijelaskan dengan lebih sederhana tentang empat tahapan dalam penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>13</sup>

Tahap *heuristik* adalah menemukan dan menghimpun bukti-bukti sejarah. Tahapan *kritik* meliputi pengujian, dan penilaian melalui perbandingan sumber yang banyak terdapat kesamaan maupun ketidaksamaan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, yang dilanjutkan dengan tahap *auffassung* atau interpretasi yang menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul, lalu diklarifikasikan satu sama lain dan dilihat apakah ada keterikatan antara fakta-fakta tersebut. Tahap terakhir adalah tahap *darstellung* atau historiografi yang merupakan proses menuliskan dan menyajikan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan telah diinterpretasikan menjadi kisah sejarah yang disusun

---

<sup>12</sup> Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto, UI-Press, Jakarta, 1975, hlm 32.

<sup>13</sup> *Ibid.*

secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara moril.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan buku berjudul *Federalism and Dictatorship of Power* untuk memahami konsep federalisme di Rusia menurut pemikiran penulisnya yaitu Mikhail Stoliarov. Buku ini juga membantu penulis untuk memahami adanya tradisi kekuasaan di Rusia sejak periode Tsar sampai periode Uni Soviet. Sehingga adanya kediktatoran hukum yang muncul pada periode Putin diasumsikan oleh Stoliarov sebagai suatu warisan tradisi kekuasaan dalam lain cara. Namun Stoliarov menyimpulkan bahwa arah dari konsep federalisme Rusia adalah federalisme demokratik yang berarti perlunya prosedur yang demokratis untuk menyeimbangkan otoritas pusat dan daerah dalam hal ekonomi dan politik. Kediktatoran hukum digunakan untuk membangun stabilitas nasional, menciptakan kondisi standar kehidupan yang layak bagi masyarakatnya dan memperkuat aparat negara hingga birokrasinya. Penulis hanya menggunakan data-data dari buku tersebut untuk mendeskripsikan adanya tradisi kekuasaan hingga contoh-contoh praktek kediktatoran hukum yang mengarah kepada sentralisasi dalam pemerintahan Putin. Namun penulis menyimpulkan konsep federalisme yang berbeda dari pendapat Stoliarov dalam bukunya tersebut. Penulis lebih memfokuskan pada praktek-praktek sentralistik pada periode Putin yang membentuk konsep federalismenya yang sentralistik guna mencapai Rusia yang kuat dan memiliki integrasi nasional yang kokoh dari masyarakatnya.

Penulis juga menggunakan buku berjudul *Federalism and Local Politics in Russia* yang terdiri dari banyak penulis namun diedit oleh Cameron Ross dan Adrian Campbell. Penulis menggunakan data-data yang dituliskan oleh Darell Slider di dalam buku tersebut untuk mendeskripsikan kejadian aktual yang terjadi di daerah-daerah subjek federasi Rusia mengenai praktek penunjukan eksekutif daerah pada masa Putin. Data-data tersebut mendukung hipotesa penulis mengenai kecenderungan adanya sentralisasi pada masa Putin.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II merupakan bab dimana penulis akan memaparkan bagaimana sistem federasi di rusia dengan menjelaskan hubungan pusat dan subjek federasi beserta pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi Federasi Rusia dan praktiknya. Namun didahului dengan konsep federasi secara umum.

Bab III merupakan bab analisis tentang bagaimana konsep federalisme dan sistem federasi di Rusia pasca bubarnya Uni Soviet, yaitu di awal pemerintahan Boris Yeltsin, dilanjutkan dengan kebijakan diktator hukum Vladimir Putin dalam penunjukkan kepala eksekutif subjek federasi yang memiliki korelasi dengan konsep federalisme di Rusia.

Bab terakhir adalah bab IV yang merupakan kesimpulan dari analisis penulisan penulisan skripsi ini.

## BAB II TEORI FEDERASI

Bab ini akan menjelaskan pemahaman mengenai federasi sebagai salah satu bentuk bangunan negara, konsep federalisme yang lahir di Amerika, dan pengertian sistem federatif. Penulis membagi bab ini menjadi empat sub bab, yang diawali dengan penjelasan mengenai sejarah kata federasi dan penggunaannya sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam tiga fungsi negara hingga lahirnya federasi sebagai bentuk negara dalam sub bab pertama. Pada sub bab kedua, penulis menjelaskan mengenai federasi sebagai salah satu bentuk bangunan negara beserta ciri-ciri federasi berdasarkan konvensi Philadelphia 1787, disertai dengan penjelasan mengenai kedua bentuk negara lainnya selain federasi. Pada sub bab ketiga akan dijelaskan mengenai hubungan ketiga bentuk negara tersebut dinilai dari kuat lemahnya integrasi masyarakat dalam sebuah negara. Pada sub bab keempat sebagai sub bab terakhir, penulis menjelaskan mengenai konsep federalisme yang lahir pertama kali di Amerika dan pemahaman mengenai sistem federatif yang dapat digunakan oleh negara-negara yang tidak ingin berkomitmen dengan konsep federalisme Amerika.

### 2.1 Sejarah Federasi

Kata federasi pertama kali digunakan pada tahun 1721 dari kata *foederationem*, yang dibentuk dari kata *foedus* “perjanjian formal antara dua orang atau lebih.”<sup>14</sup> Perjanjian tersebut dalam rangka tidak saling menyerang, namun hanya untuk bekerja sama saja. Kata federasi juga muncul dari seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Locke. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government (1690)*, John Locke membahas mengenai teori pemisahan kekuasaan dalam tiga fungsi negara. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga fungsi di bawah ini:

1. Kekuasaan Legislatif, kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang

---

<sup>14</sup> Douglas Harper, *Online Etymology Dictionary*. 2001-2010 <<http://www.etymonline.com/index.php?l=f&p=5>> diunduh pada 6 april 2010, pada pukul 11:34.

- 2 Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang dan berwenang mengadili pelanggaran undang-undang, dalam hal ini fungsi mengadili termasuk dalam pelaksanaan undang-undang.
- 3 Kekuasaan Federatif, kekuasaan yang berfungsi melakukan hubungan luar negeri dan mengadakan kerjasama luar negeri. Termasuk fungsi menjaga pertahanan keamanan negara dalam kaitannya dengan negara lain (dikutip dari Miriam Budiardjo, 1992)

Dalam teori Locke, jelas bahwa kekuasaan federatif adalah salah satu fungsi negara dalam bidang hubungan luar negeri yaitu mengadakan kerjasama dengan luar negeri, termasuk menjaga pertahanan keamanan negara yang berkaitan dengan hubungan dengan negara lain (diplomasi).<sup>15</sup> Istilah federasi yang dikategorikan Locke sebagai salah satu jenis kekuasaan negara dalam fungsinya untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri berkembang menjadi sebuah konsep yang disebut federalisme, yang disetarakan dengan konsep-konsep besar “isme” lainnya dalam kajian teori politik modern.<sup>16</sup> Federalisme ditemukan oleh para pendiri negara Amerika Serikat dalam perumusan konstitusinya pada konvensi Philadelphia tahun 1787 (*United States Information Agency*, 1949). Awal berdirinya negara Amerika Serikat adalah penggabungan 13 koloni yang memproklamkan diri menjadi suatu bentuk gabungan negara yang memiliki istilah konfederasi.<sup>17</sup> Seiring dengan perjalanan waktu, dirasakan bahwa konfederasi memiliki posisi yang lemah terhadap 13 negara yang tergabung di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah nasional (konfederasi) menemukan banyak kendala dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah nasional tidak memiliki kendali atas negara-negara bagian. Setiap negara bagian membuat aturan hukumnya sendiri-sendiri. Beberapa negara bagian dapat melakukan perdagangan

<sup>15</sup> Diplomasi dalam hubungan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. KM Panikkar. (1956). *The Principle and Practice of Diplomacy*. Asia Publishing House, hlm 16.

<sup>16</sup> Douglas. V. Verney, *Federalism, Federative Systems, and Federations: The United States, Canada, and India*. Publius, Vol. 25, No. 2 (Spring, 1995), hlm. 81-97, Oxford University Press <<http://www.jstor.org/stable/3330829>>, diunduh pada 20 Januari 2010, pada pukul 23:56

<sup>17</sup> Konfederasi/perserikatan Negara: Gabungan beberapa Negara yang merdeka dan berdaulat penuh atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, namun tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu. Prof. Miriam Budiardjo. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet 14. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 139

luar negeri sendiri tanpa melalui pemerintah nasional dan memiliki angkatan bersenjata masing-masing. Bahkan beberapa negara bagian memiliki mata uangnya sendiri. Keadaan yang juga diperburuk oleh kesulitan ekonomi, membuat setiap negara bagian menginginkan perubahan. Sehingga dilaksanakanlah konvensi Philadelphia tahun 1787 yang mengkaji ulang pasal-pasal konfederasi. Akhirnya konvensi tersebut menghasilkan Amerika baru sebagai negara yang berbentuk federasi.

## **2.2 Federasi sebagai salah satu bentuk bangunan negara**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab I, bahwa setiap negara perlu untuk memiliki kehendak yang dijadikan pedoman untuk menentukan arah tercapainya tujuan bernegara. Kehendak negara inilah yang perlu dirumuskan dalam sebuah norma dasar atau disebut juga dengan konstitusi<sup>18</sup> negara. Salah satu hal yang dirumuskan dalam konstitusi adalah struktur organisasi negara beserta fungsi dan mekanisme hubungan antar organisasi negara itu. Oleh karena itu konstitusi menjadi bagian yang paling penting untuk dirumuskan sebelum adanya pemerintahan (Jimly Asshiddiqie: 2009, 16). Sementara itu, struktur organisasi negara yang dilihat dari perspektif vertikal akan menentukan bentuk bangunan sebuah negara, sementara jika dilihat dari perspektif horizontal maka akan menentukan sistem pemerintahan negara tersebut (Abubakar Busro & Abu Daud Busro: 1985, 145). Dalam sub bab ini akan dipaparkan jenis-jenis struktur organisasi negara dilihat dari perspektif vertikal yang akan menentukan bentuk negara tersebut.

### **2.2.1 Kesatuan (*Unitary*)**

Bentuk negara kesatuan adalah suatu bentuk negara dimana wewenang dan kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengatur

---

<sup>18</sup> Konstitusi: Seperangkat peraturan tertulis mengenai tata cara bernegara dan apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Hal yang diatur dalam konstitusi ialah struktur organisasi negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, serta mekanisme hubungan antar negara atau organ negara tersebut dengan warga negaranya. Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet 1. Jakarta: PT. RajaGrasindo. hlm 96.

segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan<sup>19</sup> dalam negara kesatuan tidak terbagi-bagi. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang tidak dibatasi, bahkan kebijakan pemerintah pusat memiliki hak untuk langsung mengatur warga negaranya. Dari perspektif vertikal sebuah struktur organisasi negara, pemerintah pusat memiliki tingkat pemerintahan bawahan, yaitu pemerintah regional atau daerah yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah pusat mempunyai hak untuk mendistribusikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah dengan berasaskan desentralisasi dan dekonsentrasi<sup>20</sup>. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa menyimpang dari kebijakan pemerintah pusat.

### 2.2.2 Konfederasi (*Confederation*)

Bentuk ini adalah bentuk perserikatan negara-negara yang berdaulat penuh dalam mengatur urusan dalam negerinya dan hubungan luar negerinya sendiri. Namun bentuk ini lahir sebagai penggabungan beberapa negara dalam sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melakukan kerjasama, atau mengadakan bentuk pertahanan bersama dengan maksud memajukan kepentingan bersama antar negara yang bergabung. Penggabungan ini menghasilkan alat perlengkapan bersama yang mengatur politik luar negeri dan segala kepentingan anggota konfederasi tanpa menghilangkan kedaulatan masing-masing negara yang bergabung. Kebijakan konfederasi hanya mengikat negara-negara anggotanya, dan tidak mengikat warga negara dari setiap negara anggota (dikutip dari Miriam Budiardjo, 1992, 139-140).

Amerika Serikat di awal kemerdekaannya berbentuk konfederasi, yang dapat dilihat dalam *Articles of the Confederation Perpetual Union*<sup>21</sup> “Pasal-pasal Konfederasi dan Perserikatan Abadi” tahun 1776. Kebijakan dan seluruh

<sup>19</sup> Kedaulatan: wewenang atau kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. (2009). *Ilmu Negara*, ed rev. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 85.

<sup>20</sup> Desentralisasi: Pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dekonsentrasi: Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Drs. Musanef. (1993). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, cet 4. Jakarta: CV. Haji Masagung. hlm 19

<sup>21</sup> Anggaran konfederasi yang berlaku sebagai konstitusi pertama Amerika Serikat sebelum menjadi negara federal. <<http://www.ushistory.org/documents/confederation.htm>>, diunduh pada tanggal 25 april 2010 pukul 13.00



peraturan pemerintah konfederasi hanya mengikat negara-negara bagian saja namun tidak dapat mengikat warga negaranya. Namun ternyata pada praktiknya, pasal-pasal dalam *Articles of the Confederation and Perpetual Union* tidak sepenuhnya memiliki kewenangan mengatur negara-negara bagian apalagi warga negaranya. Misalnya bahwa pemerintah konfederasi kurang memiliki wewenang dalam hubungan luar negeri, karena sejumlah negara bagian dapat melakukan hubungan luar negeri sendiri terhadap negara-negara asing. Bahkan beberapa negara bagian memiliki tentaranya masing-masing (*United States Information Agency*, 1949, 94-95). Hal ini menunjukkan betapa lemahnya gabungan negara tanpa kedaulatan. Gabungan negara (konfederasi) dalam praktiknya hanyalah sebagai subordinat atau pemerintah bawahan, dimana pemerintah negara-negara bagian memegang kekuasaan terbesar. Sedangkan William Riker, mengklasifikasikan konfederasi sebagai salah satu jenis dari sistem yang bersifat federasi (sistem federatif), namun dalam satu cara yang berbeda dari federasi. Menurut Riker, sistem federatif adalah suatu cara yang digunakan untuk membedakan antara semua pemerintahan yang ada di dunia yang bersifat “federasi” dengan yang kesatuan.<sup>22</sup>

### 2.2.3 Federasi (*Federation*)

Bentuk negara ini adalah bentuk gabungan negara-negara yang berdaulat penuh, melalui perjanjian untuk bersatu menjadi sebuah negara gabungan yang memiliki kedaulatan keluar, namun kedaulatan ke dalam dibatasi (dikutip dari Miriam Budiardjo, 2005). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk federasi lahir setelah bentuk konfederasi di Amerika tidak mampu menjalankan pemerintahan, dikarenakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur negara-negara bagian dan warga negara setiap negara bagian tersebut. Melalui konvensi Philadelphia 1787, dibahas mengenai kebutuhan yang terpenting dari Amerika menghadapi kegagalan bentuk konfederasi adalah menyelaraskan dua kekuasaan yang berbeda. Pertama adalah kekuasaan pemerintah negara bagian dan yang kedua adalah kekuasaan pemerintah pusat. Konvensi Philadelphia menghasilkan konstitusi baru bagi

---

<sup>22</sup> Verney, *Op.Cit*, hlm 85.

federasi Amerika yang disebut “*Constitution of United States.*”<sup>23</sup> Dalam konstitusi ini diatur segala wewenang pemerintah pusat (federal)<sup>24</sup> untuk mengambil kebijakan dalam hal-hal yang bersifat nasional, seperti hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan ekonomi dan lain-lain, serta pembatasan pemerintah federal yang hanya memiliki wewenang yang bersifat nasional (*United States Information Agency: 1949, 98-100*). Namun perbedaannya dengan konfederasi adalah segala kebijakan pemerintah pusat dapat langsung mengikat warga negara dari masing-masing negara bagian. Kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah konstituen (negara bagian) untuk mengatur segala kebutuhan dalam negerinya, seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (dikutip dari Budiardjo: 2005, 141).

Pada dasarnya bentuk federasi yang ditinjau dari bangunan negaranya, adalah masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (negara gabungan) dan pemerintah konstituen (negara-negara bagian). Pembagian kekuasaan harus dirumuskan secara jelas dalam konstitusi. Menurut J.F. Strong (dalam Budiardjo: 2005, 147), pembagian kekuasaan dapat dilakukan dalam dua cara yang menentukan murni atau tidaknya suatu federasi. Pertama, jika konstitusi merumuskan segala wewenang pemerintah federal (pusat) hanya pada hal-hal tertentu yang bersifat nasional dan membatasinya, kemudian *reserve of power* atau wewenang sisa tersebut adalah wewenang dari negara-negara konstituen. Maka negara tersebut dapat adalah negara federasi yang murni atau sempurna sifat federalnya. Kedua, jika konstitusi merumuskan segala wewenang pemerintah konstituen untuk mengatur hal-hal dalam negaranya masing-masing dan membatasi wewenang tersebut untuk hal-hal tertentu saja, kemudian *reserve of power* atau wewenang selebihnya adalah wewenang dari pemerintah pusat. Maka negara tersebut adalah negara federasi yang kurang murni sifat federalnya karena negara semacam ini masih memiliki sifat yang terpusat. Wewenang negara

---

<sup>23</sup> *Constitution of United States*: Konstitusi Amerika yang merupakan hasil dari perumusan konvensi Philadelphia yang menjadikan Amerika sebagai negara yang berbentuk federasi. <http://www.ushistory.org/documents/constitution.htm> diakses pada tanggal 20 Januari 2010 pada pukul 17.30

<sup>24</sup> Federal: Suatu kata yang berasal dari kata federasi yang diartikan untuk mendeskripsikan sifat federasi yang sebenarnya seperti federasi di Amerika. Verney, *Op.Cit*, hlm 85.

konstituen terbatas dan memperkuat wewenang negara federal (pemerintah pusat). Negara semacam ini disebut “*Quasi-federation*”<sup>25</sup>.

Sangatlah jelas jika dalam bentuk federasi, pemerintah pusat tidak berada di bawah pemerintah konstituen seperti halnya dalam konfederasi. Dalam bentuk federasi, pemerintah pusat dan pemerintah konstituen berada pada posisi yang sebanding.<sup>26</sup> Berikut ini adalah ciri-ciri negara berbentuk federasi berdasarkan konvensi Philadelphia tahun 1787,<sup>27</sup> yaitu:

1. Bentuk negara federasi adalah adanya dua pemerintah (pemerintahan) yang setingkat dalam satu negara. Kedudukan pemerintah federal dan pemerintah negara konstituennya harus sejajar.
2. Kebijakan pemerintah nasional dapat langsung mengikat individu di tiap-tiap negara konstituennya.
3. Sebuah konstitusi tertulis yang dapat diamandemen dengan persetujuan seluruh negara konstituen dan kesepakatan dengan pemerintah pusat.
4. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah pusat dan pembagian wewenang pemerintah pusat dan negara konstituen yang dirumuskan dalam konstitusi.
5. Perlu ada sebuah lembaga peradilan atau semacamnya yang berfungsi menyelesaikan jika ada sengketa antara pemerintah pusat dan negara konstituen atau konflik antar negara konstituen.

### 2.3 Hubungan Bentuk Negara Kesatuan, Konfederasi dan Federasi

Melihat penjelasan di atas, struktur organisasi negara yang dilihat dari perspektif vertikal menunjukkan adanya tiga bentuk bangunan negara, yaitu kesatuan (*unitary*), konfederasi (*confederation*), dan federasi (*federation*) yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Namun ketiga bentuk tersebut jika dipandang dari sudut ilmu politik memiliki kaitan yang erat dalam proses integrasi

<sup>25</sup> Kanada adalah contoh negara berbentuk kuasi-federasi dimana pemerintah dari provinsi-provinsi di Kanada adalah bawahan (*subordinate*) dari pemerintah nasionalnya. Bahkan mereka disebut sebagai “pemerintah daerah”. Hal ini yang disebut oleh K.C. Wheare sebagai “*quasi-federation*”. Kuasi-federasi dapat diartikan sebagai federasi yang bukan federal. Verney, *Op.Cit*, hlm 87-88.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 83.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 84.

nasional<sup>28</sup> sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin kuat dan maksimal integrasi masyarakat untuk bersatu, maka hasilnya adalah negara kesatuan. Faktor-faktor yang membuat semakin kuatnya integrasi masyarakat bisa didasarkan atas persamaan nasib, pandangan hidup, suku, ras, agama, dan budaya. Sebaliknya, semakin lemah dan minimal integrasi masyarakat untuk bersatu, maka hasilnya adalah bentuk konfederasi. Faktor-faktor yang membuat lemahnya integrasi masyarakat dalam suatu wilayah bisa didasarkan pada perbedaan prinsip, pandangan hidup, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa federasi adalah bentuk pertengahan dari kesatuan dan konfederasi.

Ada beberapa pandangan yang menggambarkan hubungan bentuk negara kesatuan, konfederasi, dan kesatuan sebagai proses perkembangan kenegaraan. Salah satunya adalah (E. Utrecht dalam Budiardjo, 2005, 144) yang berpendapat bahwa permulaan perkembangan kenegaraan berawal dari bentuk negara kesatuan, karena untuk mengatur sebuah negara yang baru diperlukan sentralisasi<sup>29</sup> kekuasaan untuk mengatasi semua ancaman yang bertujuan memecah belah kesatuan negara tersebut. Setelah pemerintahan berjalan stabil, tanpa ancaman perpecahan, maka negara tersebut dapat memberikan desentralisasi kepada wilayah-wilayah yang terkait dalam membentuk negara tersebut. Mungkin jika desentralisasi dapat berjalan lebih baik, dapat dilakukan desentralisasi seperti desentralisasi dalam negara federasi. Namun (Edward. M. Sait dalam Budiardjo: 1992, 144), berpendapat bahwa perkembangan kenegaraan berawal dari negara kesatuan dan berakhir dengan kecenderungan menjadi negara kesatuan. sebagai contoh, sebuah negara kesatuan mengadakan perserikatan dengan beberapa negara kesatuan lainnya, yang bisa diasumsikan bertujuan untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pertahanan bersama, atau suatu perserikatan dalam bidang ekonomi, sosial politik, dan budaya tanpa membentuk suatu badan bersama. Dalam perkembangannya, jika kerjasama tersebut memuaskan, maka perserikatan

---

<sup>28</sup> Integrasi Nasional: konsep pemersatuan bangsa ataupun persatuan dan kesatuan bangsa. Haris Munandar, Miriam Budiardjo. 1994. *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak asasi di Indonesia: kumpulan esai guna menghormati Prof. Miriam Budiardjo*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>29</sup> Sentralisasi: suatu konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi negara, dimana keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan pada puncak hierarki secara terpusat. Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan & Otda (rev)*. Grasindo. hlm 3.

tersebut dapat berkembang lebih erat dengan dibentuknya badan bersama yang mengatur kepentingan negara-negara anggota tanpa adanya suatu ikatan negara dan tanpa menghilangkan kedaulatan dalam negara-negara anggota. Maka perserikatan ini dapat dikatakan sebagai bentuk konfederasi. Jika ternyata kerjasama dalam konfederasi sangat memuaskan, dan dirasakan tidak kuatnya ikatan dalam penggabungan negara tersebut, maka perjanjian kerjasama bisa semakin dipererat dengan bentuk federasi. Sehingga beberapa negara tersebut menjadi satu negara federal, namun kedaulatan negara-negara yang tergabung tersebut tetap berlaku ke dalam pemerintahan mereka masing-masing. Negara federal hanya mengatur hal-hal yang bersifat nasional ataupun yang berhubungan dengan hubungan luar negeri. Jika integrasi dari masyarakat setiap negara semakin tinggi, maka negara federal tersebut dapat dirubah menjadi negara kesatuan (dikutip dari Miriam Budiardjo, 1992).

Hubungan antara bentuk kesatuan, konfederasi, dan federasi yang terjadi sebagai proses perkembangan kenegaraan seperti yang diuraikan di atas tidak selalu terjadi pada praktik kenegaraan, karena hal tersebut hanyalah kecenderungan dalam proses perkembangan kenegaraan. Situasi dan kondisi dari suatu wilayah yang menentukan terjadinya proses perkembangan kenegaraan yang menghubungkan ketiga bentuk tersebut.

#### **2.4 Federalisme**

Bentuk federasi sebagai bangunan negara, lahir saat perumusan konstitusi Amerika pada konvensi Philadelphia tahun 1787, yang disebabkan ketidakstabilan pemerintahan yang berbentuk konfederasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa istilah federasi digunakan untuk memperlihatkan salah satu struktur organisasi negara dari perspektif vertikal. Dapat diasumsikan bahwa federasi adalah salah satu format dari sebuah organisasi sosial, termasuk organisasi negara (dikutip dari Preston. T. King, 1982, 69).

Sedangkan istilah federalisme, yang juga lahir dari perumusan konstitusi Amerika, dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang “federasi.” Oleh karena itu, konsep ini pun didasari pada nilai-nilai normatif manusia dan hubungan sosial. Hubungannya dengan perumusan konstitusi Amerika, adalah bahwa nilai-nilai normatif dan hubungan sosial yang terjadi saat pembentukan negara Amerika

didasari pada paham liberal yang lebih menekankan pada kebebasan individu. Maka secara prinsip, kebebasan dalam bernegara adalah hal yang paling mendasar bagi rakyat Amerika. Namun prinsip kebebasan ini mengalami kontradiksi karena negara-negara yang membentuk Amerika merasa perlu adanya ikatan kesatuan untuk mengatur seluruh kepentingan yang bersifat kebersamaan karena ikatan dalam konfederasi terbukti tidak efektif dalam mengatur seluruh kepentingan negara-negara anggotanya. Munculah ide federalisme sebagai solusi atas kontradiksi antara prinsip kebebasan dan perlunya ikatan negara yang lebih kuat. Amerika memilih untuk bersatu dalam ikatan federasi, karena setiap negara anggota (konstituen) tidak kehilangan kedaulatannya untuk mengatur urusan dalam negerinya masing-masing. Tapi kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat yang mengatur seluruh kepentingan yang bersifat nasional, seperti pertahanan dan keamanan, hubungan diplomatik dengan luar negeri, kebijakan tarif pajak, mencetak uang, sehingga ikatan kesatuan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sistem konfederasi. Namun dalam kaitannya dengan prinsip kebebasan individu, kekuasaan pemerintah pusat juga sangat dibatasi dengan adanya pemisahan kekuasaan.

Hal-hal tersebut yang mendasari konstitusi mereka. Konstitusi Amerika lahir sebagai suatu perjanjian untuk ikatan federasi. Sehingga ide federalisme yang datang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan individu dirumuskan dalam konstitusi Amerika sebagai tujuan bernegara. Maka dalam hal ini jelas bahwa federalisme yang lahir dalam perumusan konstitusi Amerika, memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kebebasan individu.<sup>30</sup> Hal inilah yang akan membedakan sistem federasi di setiap negara. J.F. Strong mengatakan bahwa tidak ada bentuk federasi di dunia ini yang sama persis (dikutip dari Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara FHUI: 2009, 157). Tentu saja karena tidak semua negara di dunia ini yang menggunakan bentuk federasi mendasarkan konstitusi mereka pada federalisme yang menjadi tujuan bernegara, seperti di Amerika. Selain itu federalisme yang dilahirkan di Amerika identik dengan prinsip-prinsip kebebasan individu. Tidak semua negara yang berbentuk federasi mau berkomitmen

---

<sup>30</sup> Verney, *Op.cit*, hal 81

menggunakan prinsip liberalisme<sup>31</sup> Amerika dengan penekanan pada kebebasan individual. Oleh karena itu menurut K.C. Wheare bahwa beberapa negara juga menggunakan federasi hanya sebagai sebuah cara untuk menangani wilayah yang luas dan pertimbangan faktor-faktor lainnya. Sementara William Riker melihat adanya sebuah sistem federatif<sup>32</sup> bagi negara-negara yang hanya menggunakan federasi sebagai cara untuk menjalankan pemerintahan. Riker memasukkan konfederasi, federasi dan kuasi-federasi sebagai bentuk-bentuk dalam sistem federatif yang digunakan untuk membedakan antara sistem yang kesatuan dengan yang federatif. Sehingga konfederasi dan kuasi-federasi dapat dianggap sebagai sistem yang “federatif” dengan lain cara.<sup>33</sup> Mengenai federalisme, setiap negara yang menggunakan federasi perlu untuk mengembangkan konsep federalismenya sendiri dalam hukum konstitusi dan praktik federasinya jika negara-negara tersebut tidak menggunakan konsep federalisme Amerika yang berdasarkan pada kebebasan individual.<sup>34</sup>

Sebagai contoh yang dapat kita lihat adalah Kanada dan India yang juga menggunakan sistem federasi. Kanada dan India hanya menggunakan federasi sebagai bentuk negaranya. Federasi hanya suatu cara dan federalisme bukan sebagai tujuan. Hal ini dapat disebabkan ukuran wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang beragam, karena masih sangat sulit menerapkan sistem pemerintahan parlementer Inggris dengan konsep federalisme Amerika. Kedua negara tersebut dikategorikan sebagai kuasi-federasi, karena seperti halnya Kanada, pemerintah provinsi Kanada adalah bawahan pemerintah nasional dan kedudukan antara pemerintah nasional dan pemerintah provinsi tidak sejajar. Perdana menteri Kanada menyebut pemerintah provinsi sebagai "pemerintah daerah", begitu pun halnya dengan di India. Maka kuasi-federasi tidak dapat

---

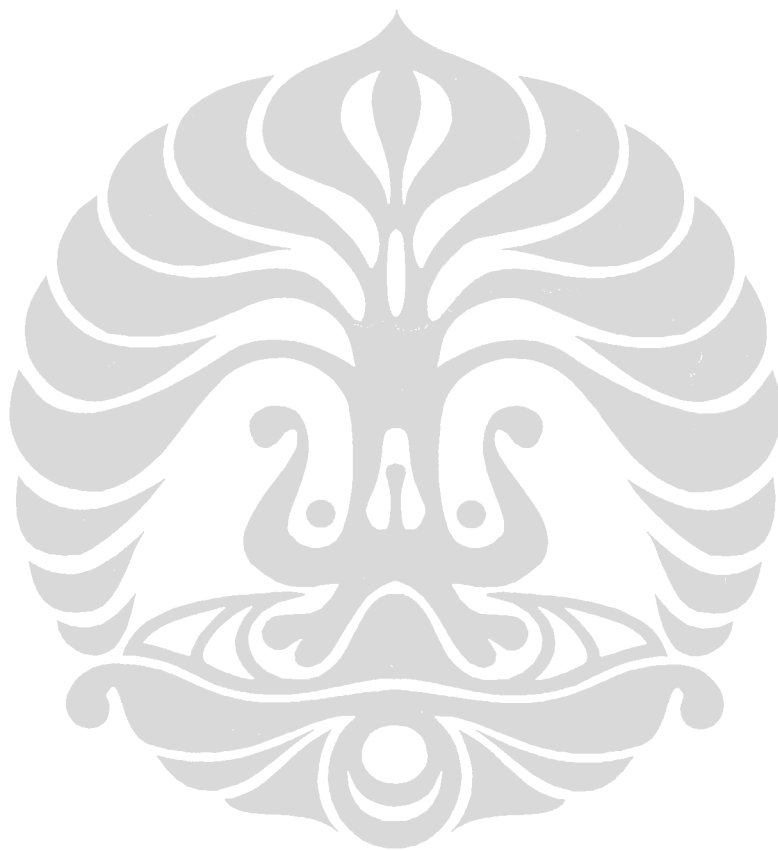
<sup>31</sup> Liberalisme: suatu paham yang berpendapat atau mempunyai hipotesis (serta cita-cita), bahwa manusia dilahirkan di dunia ini disertai segala macam hak-hak dan kebebasan. Negara beserta lembaga-lembaga negaradibentuk agar setiap orang dapat menjalankan hak-hak dan kebebasan – kebebasan tersebut sebaik-baiknya tanpa gangguan pihak luar dan merugikan orang lain. Paham liberalisme mengagungkan kebebasan sebagai milik dan kenikmatan yang setinggi-tingginya, maka dari itu orang harus menghargainya. Soetrisno P. H. *Kapita Selektta Ekonomi Indonesia*. (1992). Indonesia: Penerbit Andi. hlm 188.

<sup>32</sup> Sistem federatif: Istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan sistem pada kenyataan sebenarnya yang federatif. Verney, *Op.cit*, hlm 84-85

<sup>33</sup> *Ibid*. hlm 84

<sup>34</sup> *Ibid* hal 88-89

dikatakan sebagai federasi penuh, karena dalam kuasi-federasi kekuasaan pemerintahan nasional masih sangat kuat.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> *Ibid.* hal 94-96



## **BAB III**

### **ANALISIS**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai federasi dan konsep federalisme yang lahir di Amerika. Namun setiap negara perlu memiliki konsep federalismenya masing-masing jika tidak ingin berkomitmen dengan konsep federalisme Amerika yang berdasar pada kebebasan individu. Selanjutnya pada bab ini, penulis akan membuktikan lebih lanjut mengenai konsep federalisme di Rusia yang bersifat sentralistik. Penulis akan mengaitkan data yang dimiliki dengan teori federasi untuk membuktikan bentuk federasi dan konsep federalisme Rusia pada masa kepemimpinan Vladimir Vladimirovich Putin yang didahului dengan mendeskripsikan konsep federalisme masa Boris Yeltsin.

Penulis membagi bab ini menjadi tiga sub bab yang diawali dengan pembuktian bentuk negara Rusia sebagai negara federasi berdasarkan ciri-ciri negara federal dengan melihat pada konstitusi Federasi Rusia 1993 disertai penjelasan mengenai pengertian subjek federasi sebagai sebutan bagi negara-negara konstituen Federasi Rusia. Pada sub bab kedua, penulis menganalisis konsep federalisme di Rusia pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin dilihat dari kekuasaan hubungan garis vertikal presiden dengan kepala eksekutif subjek federasi dalam praktek kenegaraannya. Sub bab berikutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai konsep federalisme pada masa kepemimpinan Vladimir Putin (2000-2008) yang dilihat dari kediktatoran hukum Putin serta korelasinya dengan adanya praktek penunjukan kepala eksekutif subjek federasi. hubungan garis vertikal pemerintah federal dengan kepala subjek federasi yang diakhiri dengan menyimpulkan konsep federalisme pada masa kepemimpinan Putin.

#### **3.1 Federasi di Rusia berdasarkan konstitusi 1993**

Seperti telah disebutkan dalam bab 1 bahwa Rusia pasca bubarnya Uni Soviet telah memilih bentuk federasi sebagai bentuk negaranya. Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 pada bagian pertama, bab satu, pasal satu, yang berbunyi:

*“Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.”*

/Rossijskaya Federaciya – Rossiya ést' demokraticeskoe federativnoe pravovoe gosudartvo s respublikanskoy formoy pravleniya/

“Federasi Rusia – Rusia adalah negara hukum yang federasi dan demokratis dengan bentuk pemerintahan republik.”<sup>36</sup>

Bentuk federasi yang dipilih oleh Rusia memiliki latar belakang historis dimana sejak rezim Uni Soviet pun, Rusia sebagai negara konstituen Uni Soviet juga merupakan negara yang berbentuk federasi. Maka munculnya sistem federasi di Rusia adalah sebagai warisan dari bubarnya Uni Soviet. Masa transisi yang terjadi di Rusia mendorong proses federalisasi di Rusia pasca bubarnya Uni Soviet. Singkat katanya, disintegrasi Uni Soviet dan kebangkitan Rusia telah menunjukkan bagaimana cara menentukan hasil federal dan jenis federasi Rusia yang terjadi dari warisan Uni Soviet dan konteks transisi di Rusia itu (Cameron Ross & Adrian Campbel 2009: 33). Salah satu warisan budaya yang turut menentukan sistem federasi di Rusia adalah keberagaman bangsa dan etnis dalam negaranya yang terdiri dari sekitar 150 suku bangsa.<sup>37</sup> Pengakuan bahwa Federasi Rusia terdiri dari keberagaman bangsa dan etnis dapat dilihat dari pembukaan konstitusi Federasi Rusia 1993 yang menyatakan bahwa Federasi Rusia adalah negara yang terdiri dari orang-orang multinasional:

*“Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.”<sup>38</sup>*

<sup>36</sup> *Конституция Российской Федерации, Loc.Cit*

<sup>37</sup> A. Fahrurudji. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm 193

<sup>38</sup> *Конституция Российской Федерации, Op.Cit.*

/My, mnogonacional'nyj narod Rossijskoj Federacii, soedinennye obšej sud'boj na svoej zemle, utverzhdaya prava i svobody cheloveka, grazhdanskij mir i soglasie, sokhranyaya istoričeski slozhivšeesya gosudarstvennoe edinstvo, iskhodya iz obshepriznannykh principov ravnopraviya i samoopredeleniya narodov, chtya pamyat' predkov, peredavshikh nam lyubov' i uvazhenie k Otechestvu, veru v dobro i spravedlivost', vozrozhdaya cuverennuyu gosudarstvennost' Rossii i utverzhdaya nezyblemost' eyo demokratičeskoj osnovy, stremyas' obespečit' blagopoluchie i procvetanie Rossii, iskhodya iz otvetstvennosti za svoyu Rodinu pered nyneshnim i buduschimi pokoleniyami, soznavaya sebya chast'yu mirovogo soobschestva, prinimaem KONSTITUCIYU ROSSIJSKOJ FEDERACII./

“Kami, orang-orang multinasional dari Federasi Rusia, dipersatukan oleh nasib yang sama di tanah kami, melestarikan hak asasi manusia dan kebebasan, perdamaian dan kesepakatan sipil, melestarikan persatuan yang bersejarah dari negara, yang berasal dari prinsip-prinsip umum yang dikenal dengan persamaan dan penentuan diri orang-orang yang menghormati kenangan atas nenek moyang kita, yang telah diturunkan kepada kita kasih dan penghargaan terhadap tanah air kita dan iman yang baik serta keadilan, membangkitkan kedaulatan negara Rusia dan menyatakan dasar-dasar demokrasi yang tidak dapat berubah, berusaha untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran Rusia dan berasal dari rasa tanggung jawab atas tanah air kita sebelum generasi masa kini dan masa depan, serta menyadari bahwa diri kita sebagai bagian dari komunitas masyarakat dunia, dengan ini menyetujui Konstitusi Federasi Rusia.”

Seperti yang dikatakan K. C. Wheare dalam bukunya yang berjudul *Federal Government*, bahwa sistem federasi dapat digunakan oleh negara manapun sebagai suatu cara untuk mengatur wilayahnya yang luas atau pertimbangan faktor-faktor lainnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan teori tersebut dapat dianalisis bahwa pertimbangan beberapa faktor dapat membuat sebuah negara memilih bentuk federasi menjadi bentuk negaranya. Pembukaan konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 adalah pengakuan akan adanya keberagaman bangsa dan etnis dalam Federasi Rusia. Namun faktor-faktor seperti persamaan nasib, penghargaan kepada warisan nenek moyang yaitu bangsa Rusia dan pelestarian terhadap sejarah sebagai gabungan beberapa negara telah menjadi dasar pemikiran bagi bangsa-bangsa tersebut untuk bersatu dalam federasi Rusia. Namun hal-hal yang menjadi tujuan bernegara adalah kesetaraan

<sup>39</sup> Pendapat K. C. Wheare tersebut dalam bukunya *Federal Government* dikutip dari Verney, *Loc. Cit.*, hlm 81.

bangsa-bangsa tersebut dan kebebasan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka secara logis, hal tersebut telah menjadi hal yang wajar bahwa sebuah pemerintahan federatif adalah sebagai satu-satunya sistem politik yang cocok untuk ukuran keberagaman Rusia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa dan etnis.<sup>40</sup>

Berdasarkan teori federasi yang telah dipaparkan dalam bab dua, bentuk federasi memiliki ciri-ciri yang khas, salah satunya yaitu adanya peraturan dan kebijakan pemerintah federal yang dapat mengikat langsung seluruh warga negaranya. Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi pada pasal 6 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

*“1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.”*

/1. Grazhdanstvo Rossijskoj Federacii priobretaetsya i prekraschaetsya v sootvetstvii s federal'nym zakonom, yavlyaetsya edinyim i ravnym nezavisimo ot osnovanij priobreteniya./

*“1. Kewarganegaraan Federasi Rusia akan diperoleh dan diberhentikan sesuai dengan Undang-undang Federal, akan menjadi satu dan setara terlepas dari alasan-alasan yang telah diperoleh.”*

*“2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.”<sup>41</sup>*

/2. Kazhdyj grazhdanin Rossijskoj Federacii obladaet na eyo territorii vsemi pravami i svobodami i neset ravnye obyazannosti, predusmotrennye Konstituciej Rossijskoj Federacii./

*“2. Setiap warga negara Federasi Rusia harus memiliki semua hak dan kebebasan di wilayahnya dan menanggung tugas-tugas yang sama, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Federasi Rusia.”*

Mengacu pada kutipan konstitusi di atas, dapat dilihat bahwa peraturan Federasi Rusia selaku negara federal memiliki kekuatan hukum yang mengikat individu dalam tiap-tiap negara konstituennya. Bahkan masalah status

<sup>40</sup> Jorge Martinez-Vazques & Jameson Boex. (2001). *Russia's Transition to a New Federalism*. World Bank Publications, hlm 1.

<sup>41</sup> *Конституция Российской Федерации, Op.Cit.*

kewarganegaraan juga diperoleh dan dapat diberhentikan sesuai dengan undang-undang federal. Hal ini sudah sesuai dengan satu cirri dari negara federasi.

Ciri lain dari bentuk negara federasi adalah adanya sebuah lembaga peradilan atau semacamnya untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah federal dan pemerintah konstituen ataupun sengketa antara pemerintah konstituen dengan pemerintah konstituen. Ciri tersebut juga ditemukan dalam konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 dalam pasal 125 ayat 3, yang berbunyi:

*“3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: а) между федеральными органами государственной власти; б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации.”<sup>42</sup>*

/3. Konstitucionnyj Sud Rossijskoj Federacii razreshaet spory o kompetencii: a) mezhdru federal'nymi organami gosudarstvennoj vlasti; b) mezhdru organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti sub'ektov Rossijskoj Federacii; v) mezhdru vysshimi gosudarstvennymi organami sub'ektov Rossijskoj Federacii./

“3. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia akan menyelesaikan sengketa yurisdiksi: a) antara lembaga negara federal; b) antara lembaga negara Federasi Rusia dan lembaga negara subjek Federasi Rusia; c) antara lembaga tertinggi negara subjek dari Federasi Rusia.”

Kutipan dari pasal 125 tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah konstitusi Federasi Rusia berwenang menyelesaikan sengketa yuridiksi antara lembaga negara federal dalam hal ini adalah Federasi Rusia dan lembaga negara subjek Federasi Rusia dalam hal ini selaku negara konstituennya.

Ciri berikutnya dari negara federasi adalah adanya konstitusi tertulis yang dapat diamandemen oleh pemerintah federal dan pemerintah negara konstituen. Dalam konstitusi Federasi Rusia juga ditemukan pasal yang mengatur tentang amandemen konstitusi ini, yaitu pasal 134, yang berbunyi:

<sup>42</sup> *Конституция Российской Федерации, Ibid.*

*“Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.”*

“Usulan perubahan dan revisi ketentuan konstitusional dapat dilakukan oleh Presiden Federasi Rusia, Dewan Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia, legislatif (wakil) tubuh subjek dari Federasi Rusia maupun kelompok dari deputi berjumlah tidak kurang dari seperlima dari jumlah total wakil dari Dewan Federasi atau Duma Negara.”

Ciri ini juga merupakan ciri dari sebuah negara federasi dimana presiden Federasi Rusia dan pemerintah Federasi Rusia bersama-sama dengan pemerintah negara konstituen dalam hal ini diwakili oleh representatif dari subjek Federasi Rusia dapat melakukan usulan perubahan dan revisi terhadap konstitusi.

Ciri berikutnya adalah ciri yang paling essensial dari bentuk federasi yaitu adanya pembatasan wewenang pemerintah federal dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah konstituen. Hal mengenai pembagian kekuasaan ini terdapat dalam konstitusi Federasi Rusia pasal 71 sebagai pasal yang mengatur kekuasaan pemerintah federal dan pada pasal 72 yang mengatur kekuasaan gabungan antara pemerintah federal dan pemerintah konsituen. Pasal 71 berbunyi:

*В ведении Российской Федерации находятся:*

- а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;*
- б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;*
- в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;*
- г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;*
- д) федеральная государственная собственность и управление ею;*
- е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;*

- ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;
- з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
- и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
- к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;
- л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
- м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
- н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
- о) судостроительство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;
- п) федеральное коллизийное право;
- р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;
- с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
- т) федеральная государственная служба.

Yurisdiksi dari Federasi Rusia harus meliputi:

- a) adopsi dan amandemen konstitusi Federasi Rusia dan undang-undang federal serta pengawasan atas kepatuhan terhadapnya;
- b) Struktur dan wilayah federal dari Federasi Rusia;
- c) Peraturan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan manusia dan warga negara; kewarganegaraan Federasi Rusia; peraturan dan perlindungan hak asasi kaum minoritas nasional;
- d) Pendirian dari sistem federal badan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, prosedur organisasi dan kegiatan daripadanya; pembentukan badan-badan federal kekuasaan negara;
- e) Properti negara dan federal dan pengaturannya;
- f) menentukan prinsip-prinsip dasar kebijakan federal dan program federal di bidang tata negara, ekonomi, lingkungan, sosial, kultural dan pengembangan nasional dari Federasi Rusia;
- g) Pembentukan kerangka hukum untuk pasar tunggal; keuangan, moneter, kredit dan peraturan bea cukai, emisi uang dan pedoman untuk kebijakan harga; layanan ekonomi federal, termasuk perbankan federal;
- h) Anggaran federal; pajak federal dan retribusi; dana federal dari pengembangan daerah;
- i) Peta kekuasaan federal, energi nuklir, bahan bakar fisi; transportasi federal, kereta api, informasi dan komunikasi; kegiatan luar angkasa;
- j) kebijakan asing dan hubungan internasional Federasi Rusia, perjanjian internasional mengenai permasalahan perang dan damai;

- k) hubungan perdagangan luar negeri Federasi Rusia;
- l) pertahanan dan keamanan; produksi alat pertahanan; menentukan prosedur untuk penjualan dan pembelian senjata, amunisi, peralatan militer dan perlengkapannya; produksi bahan fisi, substansi bahan kimia, narkotik dan prosedur penggunaannya;
- m) Mendefinisikan status dan perlindungan perbatasan negara, perairan teritorial, ruang angkasa, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinental Federasi Rusia;
- n) Pengadilan hukum; kantor kejaksaan; kriminal, prosedur kriminal dan peraturan kriminal eksekutif; amnesti dan pengampunan; sipil, prosedur sipil dan peraturan arbitrase-prosedural; peraturan legal dari kepemilikan intelektual;
- o) konflik hukum federal;
- p) Pelayanan meteorologi; standar, model, sistem metrik dan pembagian waktu; geodesi dan pemetaan; nama objek geografis; statistik resmi dan penghitungan;
- q) dekorasi negara dan gelar kehormatan Federasi Rusia;
- r) layanan negara federal

Pasal ini sesuai dengan teori federasi bahwa wewenang pemerintah pusat dirumuskan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan nasional, seperti halnya masalah pertahanan dan keamanan, menentukan kebijakan moneter, mengadakan perjanjian dan kerjasama internasional, menyatakan perang dan perdamaian dengan negara lain.

pasal 72 merumuskan kewenangan gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah subjek federasi.

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
  - a) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
  - б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
  - в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
  - г) разграничение государственной собственности;
  - д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
  - е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
  - ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
  - з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
  - и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;



- к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
- л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
- м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;
- н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
- о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа.

1. Юрисдикси gabungan dari Federasi Rusia dan subjek Federasi Rusia meliputi;

- a) Memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum dari republik, piagam, hukum, dan peraturan legal lain dari *oblast'*, *okrug*, kota federal, *okrug* otonom dan *oblast'* otonom yang terdapat di konstitusi Federasi Rusia dan hukum federal;
  - b) Perlindungan hak asasi dan kebebasan manusia dan warga negara, perlindungan hak asasi dari kaum etnis minoritas; menjamin legalitas, hukum dan keteraturan, dan keamanan publik; rezim zona perbatasan;
  - c) Izin kepemilikan, penggunaan dan pengolahan lahan sumber daya mineral, air dan sumber daya alam lainnya;
  - d) Pembatasan kepemilikan negara;
  - e) Pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan dan keamanan ekologi; cagar alam yang dilindungi secara khusus; perlindungan monumen bersejarah dan budaya;
  - f) Masalah umum dari didikan, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, budaya fisik dan olahraga;
  - g) Koordinasi masalah kesehatan, perlindungan keluarga, ibu, ayah dan anak; perlindungan sosial termasuk jaminan sosial;
  - h) Menetapkan langkah-langkah untuk memerangi bencana, bencana alam, wabah penyakit dan menghilangkan konsekuensi daripadanya;
  - i) Penetapan pedoman umum perpajakan dan pungutan Federasi Rusia;
  - j) Administratif, prosedur-administratif, tenaga kerja, keluarga, perumahan, tanah, air dan undang-undang perhutanan; peraturan tentang kekayaan bawah tanah dan perlindungan lingkungan;
  - k) kader peradilan dan lembaga penegak hukum; notaris;
  - l) Perlindungan keaslian lingkungan dan gaya hidup tradisional dari komunitas etnis kecil;
  - m) Penetapan pedoman umum organisasi dari sistem badan kekuasaan negara dan daerah pemerintahan sendiri;
  - n) Koordinasi internasional dan hubungan ekonomi eksternal subjek Federasi Rusia, sesuai dengan perjanjian internasional Federasi Rusia.
2. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku untuk republik, *oblast'*, *okrug*, kota federal, *okrug* otonom dan *oblast'* otonom.

Pasal ini merumuskan kekuasaan gabungan antara pemerintah subjek federasi dan pemerintah pusat. Hal-hal seperti pengembangan kebudayaan dan kebudayaan seharusnya menjadi wewenang dari subjek federasi selaku negara konstituen.

Namun hal-hal yang seharusnya menjadi wewenang dari negara konstituen dibantu juga oleh negara federal. Maka dapat dilihat bahwa wewenang sisa atau *reserve of power* tidak berada dalam negara-negara konstituen Federasi Rusia namun berada di dalam negara federal karena ada kekuasaan pemerintah pusat yang turut campur dalam hal-hal yang seharusnya menjadi wewenang masing-masing negara konstituen.

### 3.1.1 Subjek Federasi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1, bahwa negara federasi adalah bentuk gabungan negara-negara yang berdaulat penuh, melalui perjanjian untuk bersatu menjadi sebuah gabungan negara (negara federal). Maka dalam sebuah negara federal terdapat dua tingkat pemerintah, yaitu pemerintah pusat (federal) dan pemerintah negara-negara konstituen yang membentuk negara gabungan tersebut. Republik Federasi Rusia menyebut negara-negara konstituennya dengan nama subjek federasi (*субъекты Российской Федерации*). Federasi Rusia memiliki enam tipe negara konstituen yang diwarisi dari zaman Uni Soviet dan memiliki delapan puluh sembilan subjek federasi, dua puluh satu republik (*республика*), enam teritorial (*край*), empat puluh sembilan regional (*область*), dua kota federal (*города федерального значения*), satu regional otonomi (*автономный область*), dan 10 area otonomi (*автономный округ*) (Stoliarov, 2003: 69). Namun ada ciri unik dari sistem federasi di Rusia ini, yaitu bahwa dalam negara Federasi Rusia terdapat karakteristik asimetri yang bukan merupakan ciri umum dalam sebuah negara federal. asimetri ini yang akan membedakan hubungan federal dengan setiap subjek federasi. Sehingga terdapat perbedaan status dari setiap subjek federasi.<sup>43</sup> Mengenai subjek federasi juga diatur dalam konstitusi Federasi Rusia bagian pertama, bab tiga, pasal 65 ayat 1.<sup>44</sup> Berikut adalah pengertian dari masing-masing nama setiap subjek federasi: *республика*: bentuk perangkat pemerintah, *край*: kabupaten terpencil.

1. *область /oblast/*: area, yang berdasarkan sejarahnya di Kekaisaran Rusia, unit administratif ini terletak di daerah perbatasan dan di tanah pasukan

<sup>43</sup>Jeffrey Kahn. (2002). *Federalism, democratization, and the rule of law in Russia*. Oxford University Press. hal 3-4.

<sup>44</sup> Lihat lampiran konstitusi, *Op.Cit, Конституция Российской Федерации*.

Cossack, sesuai dengan propinsi. Biasanya termasuk dalam Pemerintah Umum, pada zaman Uni Soviet unit politik utama sejak tahun reformasi administratif-teritorial 1923-1929). Salah satu dari enam jenis subjek Federasi Rusia. Dibentuk secara teritorial. Saat ini, Federasi Rusia memiliki 49 teritori ini. Sesuai dengan Pasal 3, Pasal. 5.<sup>45</sup>

2. *край /kray/*: secara harafiah artinya adalah tepi, yang berarti lokasi asli ada di pinggiran negara yang selanjutnya menjadi daerah yang cukup besar. Dalam masa kekaisaran Rusia daerah administratif ini adalah daerah yang termarjinalkan yang terdiri dari beberapa provinsi (pemerintahan dan gubernur jendral). Sejak tahun 1924 di masa Uni Soviet sampai dengan masa Federasi Rusia, satuan teritori administratif yang besar.<sup>46</sup>
3. *автономный округ /avtonomnyj okrug/*: Badan nasional kewilayahan subjek federasi. Bentuk ini bisa berdiri sendiri sebagai subjek federasi rusia, namun bisa juga masuk ke dalam sebuah oblast atau kray.<sup>47</sup>
4. *республика /respublika/*: berdasarkan pasal 2 dan pasal 5 dari konstitusi federasi rusia, daerah-daerah yang memiliki status republik dapat membuat konstitusinya sendiri. Secara hukum, mereka memiliki status tertinggi diantara subjek federasi yang lainnya, bukan hanya memiliki negara sendiri tapi juga symbol nasional sendiri.<sup>48</sup>
5. *город федерального значения /kota federal/*: bentuk ini diberikan kepada beberapa kota yang memiliki status independen sebagai subjek federasi. Status khusus diberikan kepada kota-kota tersebut karena sebagai pusat administratif perekonomian, politik, dan strategis militer.<sup>49</sup>
6. *автономный область /avtonomnyj oblast/*: oblast otonom.

### 3.2 Konsep Federalisme Rusia Pada Masa Kepemimpinan Boris Yeltsin

Dalam referendum tahun 1993, Rusia sangat mendukung pemberian kebebasan warga negara dan dasar bagi masyarakat sipil dalam konstitusinya yang baru. Kebebasan dan hak asasi manusia yang dianggap penting dan dijunjung

<sup>45</sup> <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16551>, diunduh pada tanggal 15 Juni 2010.

<sup>46</sup> <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/166390>

<sup>47</sup> <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12751>

<sup>48</sup> <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17962>

<sup>49</sup> <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13999>

tinggi, akan mempengaruhi sistem Federalisme Rusia. Kesetaraan bagian-bagian konstituen dari federasi dinyatakan juga dalam konstitusi yang menentukan karakter unik dari model negara federal untuk Rusia (Mikhail Stoliarov, 2003: 69).

Boris Yeltsin sebagai presiden pertama Federasi Rusia yang terpilih melalui pemilu langsung pertama di Rusia, mengedepankan langkah reformasi dan liberalisasi pasar guna melanjutkan konsep demokratisasi sebagai lanjutan dari kebijakan *perestroika*. Federasi Rusia pasca bubarnya Uni Soviet ingin mengarah kepada federalisme dengan penekanan pada konsep liberalisme seperti Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan sebuah negara federal, terdapat ketidakseimbangan pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala eksekutif subjek federasi (para gubernur dan presiden Republik), memimpin birokrasi, kepolisian, militer yang berdampak pada kecenderungan otoritarian di daerah-daerah tersebut. Langkah yang dikedepankan Yeltsin adalah seperti liberalisasi perdagangan, mekanisme pasar terbuka, mengurangi pengeluaran pemerintah. (Zeffry Alkatiri: 2007, 91,119).

Implementasi dari konsep demokratisasi sebagai lanjutan dari *perestroika* adalah dengan reformasi besar-besaran dalam sistem birokrasi Federasi Rusia. Gaya otoritarian dan totalitarisme Uni Soviet sudah ditinggalkan, presiden Boris Yeltsin memiliki pemikiran liberalisme seperti negara-negara barat yang lebih mengutamakan kebebasan individu. Namun perekonomian pasar yang diterapkan pada masa transisi berdampak pada masyarakat yang mendapatkan ketidakpastian politik secara umum, kenaikan harga komoditi, menurunnya pendapatan nyata sebagian besar penduduk, penurunan upah dan jasa, serta kekhawatiran akan munculnya mafia birokrat seperti halnya di masa Uni Soviet (menurut Otto Hieronymin dalam Alkatiri: 2009, 91). Perubahan sistem ekonomi komando pada jaman Uni Soviet menjadi mekanisme pasar di jaman Federasi Rusia dilakukan dengan cara revolusi. Akhirnya bermunculanlah orang-orang kaya baru pada jaman Yeltsin yang disebut kaum oligarkhi sekaligus menjadi mafia birokrat karena menguasai sektor-sektor ekonomi dan peran-peran penting dalam pemerintahan..

Hal ini menandakan bahwa Rusia belum dapat berevolusi dan berkomitmen kepada perekonomian pasar bebas dan liberalisme dalam konsep federasinya seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Maka selanjutnya Rusia akan menemukan sebuah konsep federalisme yang cocok dengan situasi dan kondisi negara tersebut.

### 3.2.1 Kekuasaan garis vertikal Yeltsin terhadap Kepala Eksekutif di Subjek Federasi

Pemilihan pertama atas eksekutif daerah pada tahun 1991 disetujui oleh Boris Yeltsin, selaku presiden yang terpilih pada tahun yang sama. Sebagai “percobaan,” para walikota dipilih di dua kota terbesar Rusia yang berstatus kota federal (*города федерального значения*), yakni Moskow dan Sankt Peterburg.<sup>50</sup> Kedua kota tersebut dicengkram oleh kekuatan sekutu Yeltsin, kaum akademisi liberal Gavriil Popov dan Anatoly Sobchak, dan mereka memenangkan pemilihan dengan mudahnya. Sobchak mengajukan ide pemilihan ini kepada Yeltsin. Pada wawancara panjang yang diberikan Vladimir Putin di awal pemilihan presiden tahun 2000, Sobchak juga mendapat pujian karena mengusulkan pemilihan untuk eksekutif regional di Rusia. Putin melaporkan bahwa ia telah berhasil meyakinkan anggota dewan kota St. Peterburg pada tahun 1991 untuk menciptakan deklarasi walikota, yang kemudian membuka jalan bagi pemilihan umum untuk dideklarasikan.<sup>51</sup>

Pemilihan presiden pertama atas republik etnis di Federasi Rusia bertempat di Tatarstan, tanpa persetujuan otoritas Rusia. Pemilihan ini digerakkan oleh tim Gorbachev sebagai cara untuk menjatuhkan penguasa dari presiden Rusia, Boris Yeltsin.<sup>52</sup> Etnis republik cenderung didominasi oleh nomenklatura era komunis, dan mereka mencari legitimasi melalui pemilihan yang akan menopang pengaruhnya berhadapan dengan kaum reformis pimpinan Rusia. Daripada mengambil resiko konfrontasi, Yeltsin mengizinkan republik

<sup>50</sup> Moskow dan Sankt Peterburg memiliki status daerah (‘subjek federasi’), tidak seperti kota lain yang berada dibawah daerah, atau kedua kota ini dapat juga disebut sebagai daerah istimewa. lihat lampiran 1.

<sup>51</sup> Darrell Slider, ‘Putin and the election of Regional Governors’ dalam Cameron Ross dan Adrian Campbell. (2009). *Federalism and Local Politics in Russia*. London and new York: Routledge. hlm 106-107.

<sup>52</sup> *Ibid.*

memiliki hak untuk memilih presiden melalui pemilihan umum. Keputusan legal yang diterima Tatarstan kemudian diikuti oleh republik lainnya, termasuk Chechnya yang memilih pimpinan kelompok separatis Djokhar Dudaev pada tahun 1991.

Di daerah lain, kepala eksekutif daerah (yang kemudian akan disebut gubernur) ditunjuk oleh Yeltsin. Untuk beberapa tahun setelah Rusia merdeka, Yeltsin menolak permintaan para elit daerah untuk mengizinkan pemilihan. Tujuannya adalah menahan sumber penting dari pengaruh politik di daerah-daerah, setidaknya untuk sementara. Melalui sudut pandang penasehat Yeltsin, hal yang ditakutkan adalah jika pemilihan daerah akan dimenangkan oleh lawan Yeltsin. Mengambil kembali kekuasaan penunjukkan akan memberi Yeltsin setidaknya kemampuan sementara untuk memberi pengaruh atas hal terpenting dari otoritas politik di daerah. Yeltsin memulai persetujuan pemilihan eksekutif daerah atas dasar kasus-demi-kasus di tahun 1993, saat pimpinan daerah di Bryansk, Chelyabinsk, dan Amur mengadakan pemilihan tanpa persetujuan Moskow. Pada permulaan tahun 1995-1996 pemilihan gubernur menjadi praktik standar bagi semua daerah, dan pada Oktober 1997 semua daerah memiliki eksekutif yang dipilih (Darrell Slider, 2009: 106-107).

Praktek pemilihan tersebut mencerminkan penolakan Yeltsin atas otoritas politik dan kontrol penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini pun dapat mempercepat berkurangnya kendali atas otoritas pusat di seluruh daerah. Namun terjadi juga dampak yang berbeda-beda atas otoritas politik Yeltsin. Di satu sisi, pemilihan berarti bahwa hampir tidak mungkin lagi bagi Yeltsin untuk mengganti gubernur atau presiden republik dari jabatannya yang berarti hilangnya kendali pemerintah pusat atas daerah. Namun di sisi lainnya, Yeltsin memahami bahwa pemilihan kepala eksekutif yang dilakukan dengan cara mengurangi otoritas pusat di seluruh daerah dapat menjadi sebuah hubungan mutualisme dengan banyaknya simpati dan dukungan dari pimpinan daerah yang membawa daerahnya masing-masing untuk mendukung Yeltsin di tingkat nasional dalam pemilihan presiden periode kedua Yeltsin.

Jabatan yang diperankan oleh setiap kepala eksekutif tersebut dalam hal ini adalah status baru mereka sebagai anggota dari majelis tinggi parlemen nasional, yakni dewan federasi. Dalam arti, bahwa Yeltsin tidak saja mengurangi kontrol pusat atas daerah, Namun juga memberikan mereka (para gubernur dan presiden republik terpilih) jabatan sebagai anggota dari dewan federasi. Dengan pengecualian wilayah Chechnya, perjanjian dibuat dengan republik etnis non-Rusia yang digunakan sebagai usaha untuk menghindari disintegrasi daerah-daerah tersebut dari Federasi Rusia. Republik-republik ini secara umum mempunyai otonomi lebih daripada daerah lain, dengan kata lain, sistem federal Rusia berbentuk asimetris. Perjanjian dibuat atas dasar kasus demi kasus yang memberikan kekuasaan lebih terhadap daerah-daerah seperti Tatarstan dan Bashkortostan. Banyak pimpinan daerah menggunakan pengaruhnya terhadap politisi lokal (di Rusia dikenal sebagai “sumber administratif” yang termasuk kedalamnya seperti kendali atas persidangan, polisi, media, komisi pemilihan, aset keuangan dan ekonomi daerah) untuk membantu meyakinkan bahwa Yeltsin dipilih kembali pada tahun 1996 (Slider: 2009, 108). Pada pemilihan eksekutif daerah di era Yeltsin menunjukkan perkembangan Rusia ke arah sistem yang lebih demokratis. Andrew Konitzer telah membahas bahwa ronde kedua dari pemilihan gubernur di akhir tahun 1990 menunjukkan kemajuan besar dalam demokrasi Rusia, seperti pemilih mengajukan pemimpin yang mengerti tentang kondisi ekonomi di daerahnya.<sup>53</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pelemahan wewenang garis vertikal pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak turut campur dan bahkan turut memberikan suatu bentuk desentralisasi yang luas atas otoritas di daerah dalam hal pemilihan kepala eksekutif. Sehingga federalisme Rusia pada masa Yeltsin yang dilihat dari adanya praktek pemilihan gubernur, mengarah kepada konsep federalisme yang berdasarkan pada konsep demokrasi liberal. Konsep federalisme seperti ini menginginkan adanya garis vertikal yang berupa garis kordinasi antara negara federal dengan konstituennya. Maka tidak semua calon yang ditunjuk oleh Yeltsin dapat memenangi pemilihan saat pemilihan baru

---

<sup>53</sup> Andrew Konitzer. (2005). *Voting for Russia's Governors*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press. hlm 82.

digelar. Pihak Kremlin mempunyai keberhasilan yang terbatas dalam mendapatkan kandidat yang terpilih. Menurut tim peneliti Panorama, dari lima puluh lima gubernur terpilih dengan selang waktu September 1996 hingga Oktober 1997, hanya dua puluh dua yang didukung oleh dewan koordinatif yang dikepalai pendukung Yeltsin bernama Sergei Filatov.<sup>54</sup>

### 3.3 Konsep Federalisme Rusia pada era Vladimir Putin

#### 3.3.1 Tradisi kekuasaan

Setiap saat khususnya dalam periode perubahan sosial yang besar dan reformasi, warga negara Rusia yang multinasional melihat ke masa lalu negaranya untuk menjejak sumber *державность* /*derzhavnost'*.<sup>55</sup> Kata *derzhavnost'* tidak mudah untuk diterjemahkan. Kata itu memiliki makna abstrak, namun juga mudah dimengerti dan memiliki kedekatan dengan orang Rusia. Kata *derzhavnost'* digunakan untuk mengekspresikan konsep kontradiksioner dan kompleks. Melalui *derzhavnost'* dapat ditemui nilai patriotisme<sup>56</sup>, penghormatan nilai-nilai tradisional dan kecintaan terhadap *Родина Мать* /*Rodina Mat'*<sup>57</sup>, dan dapat juga diartikan sebagai otoritarianisme, kediktatoran, serta ketidakpedulian terhadap hak-hak warga negara, khususnya saat demokrasi dan federalisme menjadi hal yang diutamakan. *Derzhavnost'* menjadi inspirasi untuk membawa tradisi leluhur besar yang memimpin Rusia. Sering kita menengok manuskrip sejarah dengan rasa kagum untuk memahami kejadian masa kini dan terkadang untuk menjustifikasi tindakan para politisi modern. Kejadian masa lalu yang bersejarah, menyajikan berbagai kejadian sebagai alasan atas penggunaan kekuasaan berlebihan. Dalam analisis sejarah Rusia ditemui fakta bahwa setiap rezim yang berkuasa di Rusia secara esensial tidak banyak berubah mulai dari masa memorial

<sup>54</sup> Darrell Slider dalam Cameron Ross and Adrian Campbell. *Op.Cit.* hlm 108.

<sup>55</sup> *Державность* atau *Derzhavnost'*: sebuah istilah Rusia yang berpikir dalam hal identitas dan tindakan sebagai kekuasaan besar. Jeffrey Mankoff. (2009). *Russian Foreign Policy*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. hal 61-62.

<sup>56</sup> Patriotisme adalah sebuah keterikatan seseorang dengan suku, bangsanya, negaranya. Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal. RR. Ardiningtiyas Pitaloka, M.Psi. (2004, 18 Februari). *Patriotisme dan Nilai Kemanusiaan*. <[http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial\\_detail.asp?id=274](http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=274)>

<sup>57</sup> *Rodina Mat'* biasa diterjemahkan menjadi Ibu Pertiwi atau dalam bahasa Inggris *Motherland*



Kievan Rus hingga Ivan yang Kejam, dari Peter Agung hingga Nikolai dari keluarga Romanov, dari Lenin dan Stalin hingga para pemimpin terkini dari partai Komunis. Pencarian kekuasaan penuh serta konservatisme politis memiliki asal yang sama.

Kebijakan Putin kini merupakan bagian dari *derzhavnost'*, konservatisme politis dan usaha pembentukan demokrasi serta modernisasi. Tujuan dari langkah yang diambil melalui administrasi Putin merupakan reformasi dari struktur kekuasaan yang sama. Kontrak sosial yang baru diletakkan di dalam inti reformasi. Poin dasar digunakan untuk memperkuat “garis vertikal kekuasaan,” untuk mengakhiri praktik “tawar-menawar politis,” untuk mengurangi penyebaran modal dari kelompok oligarkhi dan untuk meningkatkan kendali atas para elit di wilayahnya. Namun ideologi pasca Uni Soviet dan ideologi kaum nasionalis tidak menjadi bagian dalam kebijakan baru ini.

Kebijakan yang disebut sebagai kebijakan baru Putin dapat dikatakan mengandung konsep baru dari konservatisme. Konsep baru dari konservatisme ini adalah *derzhavnost'* yang diterapkan dalam negara demokrasi federal. Melalui cara ini, terminologi seperti “konservatisme negara” atau juga “konservatisme yang tercerahkan” yang memiliki tradisi kuno berabad lamanya, kini terbangkitkan dalam konteks modern.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Mikhail Stoliarov. (2003). *Federalism and The Dictatorship of Power in Russia*. New York: Routledge, hlm 7-8.

### 3.3.2. Kediktatoran Hukum

Sejak awal kampanye kepresidenan tahun 2000, Vladimir Putin mencanangkan sebuah gagasan mengenai “kediktatoran hukum” sebagai inti dari kepresidenannya. Inti dari kebijakan ini adalah penekanan terhadap peraturan yang stabil atau prosedur hukum yang jelas, serta peranan utama negara sebagai penjamin penegakan hukum. Karena seperti yang dapat dilihat pada evaluasi Rusia pada tahun 1990-an, Rusia dipandang sebagai negara yang lemah dalam hal penurunan kapasitas administrasi dan birokrasi pemerintah. Hal lemah lainnya adalah kondisi negara Rusia yang tidak dapat menjalankan prinsip dari pengaturan dan tertib hukum.<sup>59</sup> Hal ini diucapkan oleh Putin saat wawancara dengan sebuah media “Известия.” Putin mengatakan:

*“Не надо путать административные реформы и реформы по укреплению федерации. Первые - лишь малая часть второго. Что касается так называемого "федеративного пакета", то он полностью в логике установления правил, поскольку у каждого органа государственной или муниципальной власти должны быть не только права, но и четкая ответственность.”<sup>60</sup>*

/Ne nado putat' administrativnye reformy i reformy po ukrepleniyu federacii. Pervye – lish' malaya chast' vtorogo. Chto kasaetsya tak nazyvaemogo “federativnogo paketa,” to on polnost'yu v logike ustanovleniya pravil, poskolku u kazhdogo organa gosudarstvennoj ili municipal'noj vlasti dolzhny byt' ne tol'ko prava, no i chetskaya otvetstvennost'./

“Anda tidak harus bingung tentang reformasi administrasi dan reformasi untuk memperkuat federasi. Yang pertama - hanya sebagian kecil dari kedua. Adapun yang disebut "paket federal”, itu adalah sepenuhnya dalam menetapkan aturan logika, karena masing-masing organ negara atau pemerintah kota tidak hanya harus benar, tetapi juga tanggung jawab yang jelas.”

Pernyataan Putin ini mengandung arti, bahwa tujuan utama Putin adalah mereformasi administrasi dan memperkuat federasi yang berarti pemerintah harus harus menjadi benar dalam menjalankan tugas kenegaraan bahkan bertanggung

<sup>59</sup> Vladimir Gel'man. (October 2000). “*The Dictatorship of Law in Russia: Neither Dictatorship, Nor Rule of Law*”, PONARS Policy Memo 146, European University at St. Petersburg. [http://csis.org/files/media/isis/pubs/pm\\_0146.pdf](http://csis.org/files/media/isis/pubs/pm_0146.pdf)

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Putin oleh sebuah media koran di Rusia “Известия” pada tanggal 14 Juli 2000. *Интервью Президента Российской Федерации В.В.Путина газете "Известия" опубликовано 14 июля 2000 года.* Dikutip dari <http://2002.kremlin.ru/events/46.html>

jawab atas segala kebijakan dan praktik kenegaraan yang dilakukan. Hal ini menjadi atmosfir yang baik bagi kehidupan sosial dan reformasi ekonomi di Rusia, namun di sisi lain muncul kekhawatiran bagi beberapa orang akan munculnya kontrol pemerintah pusat yang sangat kuat mengingat Putin adalah seorang mantan anggota KGB (КГБ)<sup>61</sup> pada masa Uni Soviet yang masih memiliki tradisi *derzhavnost*' yang kental.

Mengenai pengertian dari kediktatoran hukum, dapat dikutip dari sebuah kata-kata bijak Putin yang berkenaan dengan kebijakan diktator hukum.

*“Демократия - это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать.”  
Владимир Путин*

/Demokratiya – éto diktatura zakona, a ne tekh, kto po dolzhnosti obyazan étot zakon otstaivat'.

Vladimir Putin/

“Demokrasi adalah kediktatoran hukum dan semua yang menjabat harus menegakkan hukum.

Vladimir Putin”<sup>62</sup>

Penulis dapat menganalisis kata-kata Putin tersebut bahwa kediktatoran hukum yang dimaksud Putin adalah sebuah penegakkan aturan hukum yang dijalankan oleh penguasa yang menjabat dalam pemerintahan hingga terciptanya demokrasi. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus ditaati oleh siapapun, baik pemerintah, birokrasi, rakyat, maupun perwakilan dari berbagai pemerintahan sesuai dengan kata-kata Putin dalam acara pertemuannya dengan peserta malam amal “Pangeran Kecil” pada tanggal 30 Mei 2010.

*“...Конечно, все должны соблюдать закон. ...Если вы помните, меня тогда критиковали за это, я еще в начале 2000 годов говорил о диктатуре законов. Я до сих пор считаю, что это правильное словосочетание. Имеется в виду соблюдение закона всеми: и властями, и рядовыми гражданами, представителями различных органов власти и управления.”<sup>63</sup>*

/... Konechno, vse dolzhny soblyudat' zakon. ...Esli vy pomnite, menya togda kritikovali za éto, ya escho v nachale 2000 godov govoril o

<sup>61</sup> KGB (КГБ) adalah singkatan dari *Комитет Государственной Безопасности* yang merupakan komisi keamanan negara yang dibentuk pada pada tanggal 13 Maret 1954. A. Fahrurodji. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm 145.

<sup>62</sup> <http://www.democracy.ru/quotes.php>, diunduh pada 19 juni 2010

<sup>63</sup> EchoMSK : *Встреча В.Путина с участниками благотворительного вечера «Маленький принц» Воскресенье 30.05.2010 | 16:21* <http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/683733-echo/> diunduh pada 19 Juni 2010

diktature zakonov. Ya do sikh por schitayu, chto éto pravil'noe slovosochetanie. Imeetsya v vidu soblyudenie zakona vsemi: i vlastyami, i ryadovymi grazhdanami, predstavitel'yami razlichnyx organov vlasti i upravleniya./

“...Tentu saja semua orang harus mematuhi hukum. ...Jika anda ingat , ketika mereka mengkritik saya di awal tahun 2000 yang berbicara mengenai kediktatoran hukum. Saya masih berpikir bahwa itu adalah frase yang benar. Hal itu mengacu pada ketaatan hukum oleh semua pihak, pemerintah, dan warganegara, perwakilan dari berbagai pemerintahan dan birokrasi.”

Berdasarkan pernyataan dan sebuah kata-kata Putin di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mengikat objek dari kediktatoran hukum tersebut yaitu semua pihak, baik pemerintah, warganegara, birokrasi, dan perwakilan dari berbagai pemerintahan. Maka menurut analisa penulis bahwa pengertian dari diktator hukum adalah hukum yang menjadi subjek pelaku kediktatoran yang dapat memaksakan ketaatan dari semua pihak sebagai objeknya dalam negara Federasi Rusia.

Dalam pelaksanaannya, kediktatoran hukum direalisasikan dalam norma atau peraturan legal yang diberlakukan dan terkadang dipaksakan oleh pihak Kremlin dibawah Putin. Dua contoh jelas dalam hal ini adalah hukuman terhadap seorang *tycoon*<sup>64</sup>, Boris Berezovksy yang dipaksa untuk menjual sahamnya dari saluran televisi ORT TV karena ketidaksetiaannya pada Kremlin, pemenjaraan Khodorsvsky atas perbuatannya menjual asset gas negara terbesar di Rusia kepada pihak asing dan pemberian penghargaan kepada presiden Mintimer Shaimiev dari Tatarstan (yang diberi hak untuk ikut dipilih kembali pada termin ketiga dari jabatannya karena kesetiaannya pada Kremlin). Maka dapat dilihat dari hal tersebut, inti dari kebijakan diktator hukum memiliki fungsi utama untuk membagi dan mengatur “kaum oligarki” beserta pimpinan daerah.<sup>65</sup>

Hal ini dikarenakan reformasi ideologi dan ekonomi yang mengarah pada liberalisme dan pasar bebas dan dilakukan secara revolusi masih sangat sulit

<sup>64</sup> Orang-orang kaya dengan latar belakang pedagang, bisnis, atau kaum industrialis, yang terkadang ikut membuat keputusan dalam hal pemerintahan karena kekuatan finansialnya. Kata ini sendiri berasal dari kata *taikun* yang dalam bahasa Cina *tai* berarti besar dan *kiun* pangeran, atau dapat juga diartikan sebagai pangeran besar. Kata ini dibawa ke Amerika melalui kedatangan orang Amerika ke Jepang, yang pada mulanya panggilan ini ditujukan kepada para *shogun*.

<sup>65</sup> Gel'man, *Op.Cit.*

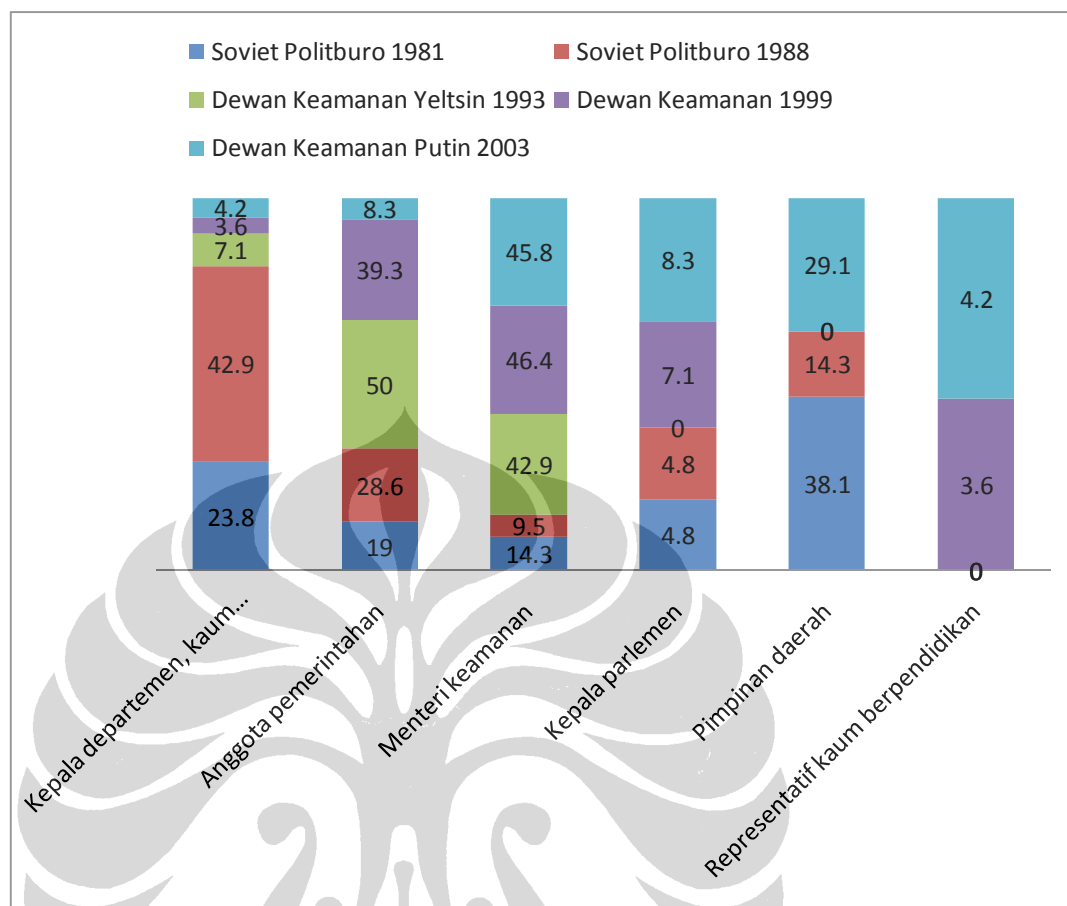
diterapkan pada kondisi sosial masyarakat Rusia saat itu karena tradisi kekuasaan masih menjadi budaya di Rusia. Sehingga implementasi lanjutan dari kebijakan *perestroika* dan komitmen terhadap demokrasi kebebasan pasca Uni Soviet justru mengakibatkan pelemahan terhadap otoritas pemerintah pusat dalam pengaturan hukum. Maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang kuat oleh pemerintah pusat untuk mengatur sumber-sumber ekonomi yang penting dan berpotensi bagi pemasukan negara.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa salah satu tujuan utama kediktatoran hukum adalah mengatur pemerintah daerah. Hal ini memiliki korelasi dengan upaya penguatan kekuasaan Putin atas pemerintah-pemerintah daerah. Presiden Vladimir Putin menyarankan reformasi radikal dari sistem politik yang diwarisi dari Boris Yeltsin. Setelah satu tahun Putin menjabat sebagai presiden, analis politik menyatakan beberapa fitur pokok dari reformasi ini: penguatan kekuasaan vertikal dan sentralisasi kekuasaan, menciptakan kondisi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, harmonisasi dari dasar legislatif federasi, menyeragamkan regulasi bagi praktik politik dan ekonomi (Stoilarov, 2003: 134). Implementasi dari penguatan kekuatan vertikal dan sentralisasi kekuasaan Putin terlihat dari representatifnya yang sebagian besar terdiri dari *siloviki*.<sup>66</sup> *Siloviki* adalah Interpretasi dominan dari fenomena ini yang bertujuan untuk mengevaluasi penunjukan sebagai strategi politik dan sebagai pengungkapan dari arah kebijakan otoritarian yang dikejar oleh Putin.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penempatan *siloviki* dalam administrasi Putin.

---

<sup>66</sup> *Siloviki* berasal dari frase *силовые структуры* yang artinya struktur kekuasaan. Pada zaman Uni Soviet *siloviki* berarti termasuk orang-orang yang ada dalam pemerintahan termasuk militer dan personil KGB.  
[http://www.twq.com/07winter/docs/07winter\\_bremmer.pdf](http://www.twq.com/07winter/docs/07winter_bremmer.pdf). Diunduh pada 15 Juni 2010.

Gambar 3.1 Struktur Kepemimpinan Nasional 1981 - 2003<sup>67</sup>

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa pada pemerintahan Yeltsin tahun 1993, *siloviki* tidak menduduki administrasi pemerintahan seperti parlemen, pimpinan daerah, dan representasi akademisi (kaum berpendidikan). Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa pada pemerintahan Yeltsin tahun 1993, seluruh pengaruh dan kedudukan *siloviki* sebagai kaum konservatif dalam parlemen telah dibersihkan. Yeltsin tidak menginginkan adanya kaum konservatif dalam tubuh parlemen yang dianggap menghalangi kebijakan dalam pemerintahannya.

Hal itu dilakukan karena Yeltsin ingin membenahi sistem perpolitikan dengan merencanakan pemilihan anggota parlemen baru. Karena anggota parlemen lama didominasi oleh kelompok konservatif yang memiliki kecenderungan berlawanan dengan kebijakan eksekutif. Konflik antara Yeltsin

<sup>67</sup> “*Siloviki*” in politics – *Russian Military Reform*, diunduh pada 19 Juni 2010  
<http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=29428>

dan parlemen ini terbukti telah terjadi dalam dua tahun pertama pemerintahan Yeltsin. Salah satu konfliknya adalah masalah dalam penyusunan draft konstitusi baru yang dipimpin sendiri oleh Boris Yeltsin. Draft pertama konstitusi yang berhubungan dengan perubahan hirarki birokrasi menjadi otonomi daerah telah digugat oleh banyak kaum konservatif. Sementara itu otonomi daerah mendapat respon positif dari representatif di daerah (dikutip dari Alkatiri: 2007, 105-113). Maka hal-hal tersebut menjadi dasar pemikiran Yeltsin untuk tidak memberikan tempat bagi *siloviki* yang didominasi oleh kaum konservatif dalam administrasi pemerintahannya di parlemen dan kepemimpinan daerah.

Namun hal yang sebaliknya muncul pada masa pemerintahan Vladimir Putin. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Putin telah memberikan tempat dan peranan bagi *siloviki* dalam semua bidang administrasi pemerintahannya berdasarkan tabel di atas. Penunjukan *siloviki* pada jabatan politik merupakan hal yang biasa pada era Putin. Nampak peningkatan jumlah yang besar akan penunjukan *siloviki* yang dilakukan masa pemilihan Putin, yaitu pada akhir pemerintahan Yeltsin pada tahun 1999 hingga setelah menjabat kursi kepresidenan (dikutip dari Bettina Renz, 2007: 2).

Dapat dianalisis bahwa kediktatoran hukum menjadi dasar penguatan kekuasaan Putin selaku pemerintah federal untuk melakukan kontrol terhadap administrasi daerah melalui pimpinannya. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari tindakan Presiden Vladimir Putin membagi seluruh subjek federasi menjadi tujuh distrik federal dan diawasi oleh para representatifnya yang ditempatkan di setiap distrik. Hal ini dikatakan Putin dalam sebuah pidato kenegaraannya dalam penyerahan pesan tahunan Presiden Federasi Rusia kepada Majelis Federal Federasi Rusia. Dalam pidato tersebut Putin mengatakan:

*“Одним из первых наших шагов по укреплению федерализма стало создание федеральных округов и назначение в них представителей Президента России...”<sup>68</sup>*

<sup>68</sup> *Выступление при представлении ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 8 июля 2000 года Москва. <http://2002.kremlin.ru/events/42.html>. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2010, pada pukul 01.19.*

/Odnim iz pervykh nashikh shagov po ukrepleniyu federalizma stalo sozdanie federal'nykh okrugov i naznachenie v nikh predstavitelej Prezidenta Rossii.../

“Salah satu langkah pertama kami untuk memperkuat federalisme adalah penciptaan distrik federal dan penunjukan representatif Presiden Rusia...”

Ketujuh distrik federal tersebut adalah:

**Distrik Federal Pusat:** Belgorod Oblast', Bryansk Oblast', Vladimir Oblast', Voronezh Oblast', Ivanovo Oblast', Kaluga Oblast', Kostroma Oblast', Kursk Oblast', Lipetsk Oblast', Moscow Oblast', Kota Moskow, Oryol Oblast', Ryazan Oblast', Smolensk Oblast', Tambov Oblast', Tver Oblast', Tula Oblast', Yaroslavl Oblast'. Pusat distrik: Mowcow.

**Distrik Federal Baratdaya:** Republik Karelia, Republik Komi, Arkhangelsk Oblast', Vologda Oblast', Kaliningrad Oblast', Leningrad Oblast', Murmansk Oblast', Novgorod Oblast', Pskov Oblast', Kota Sankt Peterburg, Nenets Autonomous Okrug. Pusat distrik: Sankt Peterburg.

**Distrik Federal Kaukasus Utara:** Republik Adygeya (Adygeya), Republik Dagestan, Republik Ingush, Republik Kabardin-Balkar, Republik Kalmykia-Khalmg Tangch, Republik Karachayevo-Cherkess, Republik Ossetia Utara, Republik Chechen, Krasnodar Krai, Stavropol Krai, Astrakhan Oblast', Volgograd Oblast', Rostov Oblast'. Pusat distrik: Rostov-on-Don.

**Distrik Federal Volga:** Republik Bashkortostan, Republik Mari El, Republik Mordovia, Republik Tatarstan (Tatarstan), Republik Udmurt, Republik Chuvash-Chavash, Kirov Oblast', Nizhny Novgorod Oblast', Orenburg Oblast', Penza Oblast', Perm Oblast', Samara Oblast', Saratov Oblast', Ulyanovsk Oblast', Komi-Permyak Autonomous Okrug. Pusat distrik: Nizhny Novgorod.

**Distrik Federal Ural:** Kurgan Oblast', Sverdlovsk Oblast', Tyumen Oblast', Chelyabinsk Oblast', Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yamal-Nenets Autonomous Okrug. Pusat distrik: Yekaterinburg.



**Distrik Federal Siberia:** Republik Altai, Republik Buryatia, Republik Tuva, Republik Khakasia, Altai Krai, Krasnoyarsk Krai, Irkutsk Oblast', Kemerovo Oblast', Novosibirsk Oblast', Omsk Oblast', Tomsk Oblast', Chita Oblast', Aginsky Buryat Autonomous Okrug, Taimyr (Dolgan-Nenets) Autonomous Okrug, Ust-Ordynsky Buryat Autonomous Okrug, Evenk Autonomous Okrug. Pusat distrik: Novosibirsk.

**Distrik Federal Timur Jauh:** Republik Sakha (Yakutia), Primor'e (Maritime) Krai, Khabarovsk Krai, Amur Oblast', Kamchatka Oblast', Magadan Oblast', Sakhalin Oblast', Jewish Autonomous Oblast', Koryak Autonomous Okrug, Chukchi Autonomous Okrug. Pusat distrik: Khabarovsk.<sup>69</sup>

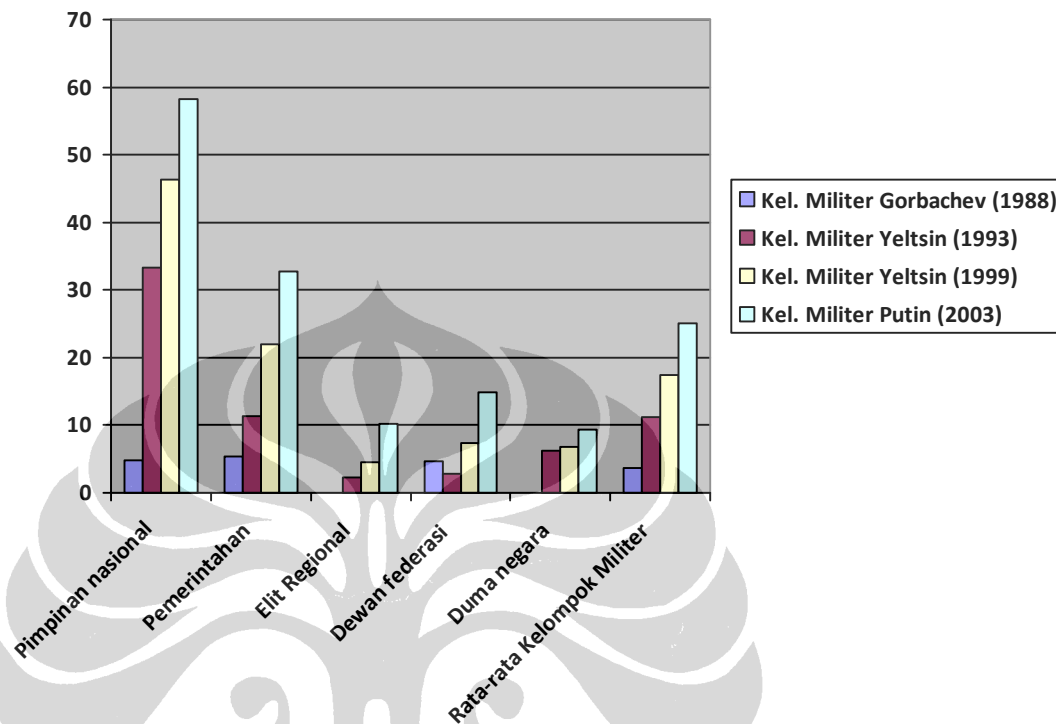
Para representatif ini berhubungan langsung dengan pihak berwenang dari pusat, yaitu Presiden, dan menjadi bagian dari Administrasi Presidensial lokal Rusia. Dalam rangka melaksanakan hak konstitusional dari wilayah Rusia, serta untuk meningkatkan efisiensi dari pihak berwenang Federal dan mengendalikan implementasi dari keputusannya, Presiden Federasi Rusia telah secara signifikan meningkatkan kekuasaan vertikalnya dengan mendelegasikan banyak perangkat administratif hingga para representatifnya.<sup>70</sup>

Berikut ini juga ada tabel mengenai pembagian orang-orang yang memiliki latar belakang militer dalam kelompok elit dari tahun 1988-2003.

<sup>69</sup> Stoliarov, Op.Cit, hlm 255-256.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm 34-35

Gambar 3.2 Pembagian orang-orang yang memiliki latar belakang militer dalam Kelompok Elit 1988-2003<sup>71</sup>



Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa persentase pada ranah elit regional di masa pemerintahan Boris Yeltsin tahun 1993 memiliki persentase sebesar 2,2 % dan sebesar 4,5 % pada akhir pemerintahan Boris Yeltsin tahun 1999. Penguatan persentase terjadi pada era Putin yaitu sebesar 10,2 %. Maka berdasarkan persentase pada era Putin, penulis dapat menganalisis bahwa penguatan jumlah orang-orang berlatarbelakang militer pada masa Putin memiliki korelasi dengan penguatan kekuasaan vertikal Putin sebagai pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah daerah. Didukung pula dengan latar belakang Putin yang notabeneanya adalah seorang mantan anggota KGB pada masa Uni Soviet.

Sebagai contoh pada bulan November 2000, Laksamana Vladimir Yegorov memenangkan pemilihan kepala eksekutif Kaliningrad. Pada bulan

<sup>71</sup> "Siloviki" in politics – Russian Military Reform , Op.Cit.

Desember 2000, Kepala Lokal FSB, Vladimir Kulakov juga berhasil memenangkan posisi yang serupa di Voronezh, dan Jendral Vladimir Shamanov di Ul'yanovsk. Pada musim semi tahun 2002, dua orang Jendral FSB menjadi gubernur subyek federasi, yaitu Murat Zyazikov di Ingushetiya dan Viktor Maslov di Smolensk.<sup>72</sup> Maka beberapa pendapat bahkan mengatakan, seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Olga Kryshchanovskaya dan Stephen White bahwa tujuan utama Putin adalah pendirian sistem pemerintahan "militokrasi" (dikutip dari Bettina Renz: 2006, 2). Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan pemikiran Putin. Hal ini sesuai dengan kutipan pernyataan Putin yang menjadi judul dalam sebuah wawancara dengan majalah "Известия." Putin mengatakan:

*"Россия не должна быть и не будет полицейским государством."*<sup>73</sup>  
/Rossiya ne dolzhna byt' i ne budet policejskim gosudarstvom./  
"Rusia tidak perlu dan tidak akan menjadi negara polisi."

Putin menyatakan bahwa Rusia tidak berorientasi menjadi negara polisi dengan dominasi siloviki dan representatif Putin yang mayoritas berasal dari kalangan militer dalam administrasi pemerintahannya. Namun Putin hanya ingin membuat pemerintahan yang kuat dan efisien. Hal ini juga dikatakannya dalam wawancara tersebut. Salah satu dialog dalam wawancara tersebut adalah:

**ВОПРОС:** Одна из самых обсуждаемых сейчас тем - Ваши инициативы по укреплению власти. Многие видят в этом очередное "закручивание гаек". Вы сами какой хотели бы видеть власть в России?"

**PERTANYAAN:** Salah satu topik yang dibahas hari ini - inisiatif Anda untuk memperkuat pemerintah. Banyak melihat ini sebagai tindakan keras lain. Kekuatan seperti apa yang ingin anda lihat di Rusia?"

**В.В.ПУТИН:** Результативной, а значит, сильной. Иначе она не власть, а издевательство над народом. Другое дело, о какой силе идет речь и чему эта сила служит. Если власть держится только на том, чтобы "строить" общество на ограничениях и запретах, а нормальному человеку хочется держаться от нее подальше, - цена ей ноль. Если же власть открыта, предсказуема и использует свои рычаги, чтобы защитить достоинство граждан, их свободы, безопасность, право выбора, если она дает возможность стабильно и честно зарабатывать себе на хлеб - она по-настоящему эффективна и сильна."<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Olga Kryshchanovskaya and Stephen White. *Putin's Militocracy*. dikutip dari situs [http://www.russiafoundation.org/showfile.php?name=putins\\_militocracy.pdf](http://www.russiafoundation.org/showfile.php?name=putins_militocracy.pdf). Diunduh pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>73</sup> "Известия", *Op.Cit.*, <http://2002.kremlin.ru/events/46.html>

<sup>74</sup> *Ibid.*

“VLADIMIR PUTIN: efisien, dan karena itu kuat. Jika tidak, itu bukan kekuasaan, tetapi olok-olok orang. Satu hal, kekuatan macam apa yang terlibat dan apa kekuatan ini digunakan. Jika daya hanya dilakukan untuk "membangun" masyarakat untuk pembatasan dan larangan, tapi orang normal ingin tinggal jauh darinya, - harga itu nol. Jika pemerintah terbuka, dapat diprediksi dan menggunakan leverage untuk melindungi martabat warga kebebasan mereka, keamanan, hak untuk memilih, jika memungkinkan yang stabil dan jujur mendapatkan roti mereka - itu benar-benar efektif dan kuat.”

Maka dapat dianalisis, bahwa pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang efisien. kekuatan atau kekuasaan kuat yang dimaksud dalam perspektif Putin adalah pemerintah yang terbuka, dapat diprediksi dan melindungi kebebasan, keamanan, stabil dan jujur. Hal itulah yang disebut dengan kekuasaan yang efektif dan kuat. Sebuah kekuasaan yang membangun masyarakat tidak hanya pada aturan hukum yang membatasi dan melarang, namun juga sebuah aturan hukum yang menjamin kepastian hukum, kestabilan ekonomi dan politik guna menyejahterakan rakyat.

### **3.3.3 Kekuasaan Garis Vertikal Putin Terhadap Kepala Eksekutif Subjek Federasi**

Hal yang paling signifikan yang dibuat oleh Vladimir Putin kepada sistem politik Rusia adalah keputusannya pada September 2004 untuk mengakhiri pemilihan eksekutif daerah. Konsekuensi akibat keputusan ini adalah adanya kemungkinan pelemahan otoritas daerah atas otoritas pemerintah pusat. Tragedi sekolah Beslan yang menyebabkan 300 sandera kehilangan nyawanya, menjadi dasar kebijakan Putin untuk membentuk otoritas bersatu di Rusia. Pada tanggal 13 September 2004, Putin berbicara atas nama pemerintah Rusia dan pimpinan daerah serta berpendapat bahwa teroris akan tetap mencari cara untuk membawa Rusia dan pemerintahannya pada kehancuran.

Maka sesuai pasal 77 ayat 2 konstitusi Federasi Rusia tahun 1993:

*“В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации”.*

“Dalam yurisdiksi Federasi Rusia dan kekuasaan Federasi Rusia tentang isu-isu dalam yurisdiksi gabungan dari Federasi Rusia dan subjek Federasi Rusia tubuh federal kekuasaan eksekutif dan badan-badan kekuasaan eksekutif subyek Federasi Rusia akan membentuk sistem tunggal kekuasaan eksekutif di Federasi Rusia.”<sup>75</sup>

Berlandaskan pasal dalam konstitusi tersebut, Putin menciptakan “sistem otoritas yang bersatu,” yang berfungsi sebagai hierarki tunggal yang terintegrasi. Sistem “eksekutif vertikal” ini akan menggantikan pemilihan umum dengan proses yang melibatkan organ regional maupun nasional dalam pemilihan eksekutif daerah. Putin mengajukan hal ini agar dapat tercapai melalui pemilihan gubernur oleh majelis daerah, dengan calon kandidat yang dinominasikan oleh presiden Rusia.<sup>76</sup>

Hal tersebut adalah implementasi dari kediktatoran hukum yang memiliki fungsi mengatur otoritas di daerah. Tujuannya adalah sentralisasi yang memperlihatkan otoritas pemerintah federal. Putin telah memberlakukan desentralisasi fungsional<sup>77</sup> kepada para representatifnya di setiap distrik yang telah dibagi oleh Putin. Para representatif ini diberi begitu banyak tanggung jawab. Tugas utama mereka ialah mengawasi pihak berwenang lokal, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kebijakan luar maupun dalam negeri dari pemerintah pusat dan membawa keputusan dari institusi federal. Mereka juga menyarankan kepada Presiden dalam hal penunjukan pegawai di wilayahnya dan mempersiapkan laporan reguler mengenai keamanan nasional, politik, sosial, dan situasi ekonomi di dalam distrik federalnya. Namun, detilnya mekanisme tidak pasti dari sistem ini adalah pembagian pengawasan dari pihak administrasi, batasan untuk kekuasaan para representatif, dan hubungan para representatif dengan kekuasaan dari pimpinan wilayah.<sup>78</sup> Namun ketidakjelasan antara

<sup>75</sup> Конституция Российской Федерации, *Op.Cit.*

<sup>76</sup> V. Putin, “Выступление на расширенном заседании Правительства с участием глав субъектов Российской Федерации” 13 September 2004. Diunduh dari situs kepresidenan <http://www.president.kremlin.ru>.

<sup>77</sup> Desentralisasi Fungsional: Pemberian hak/wewenang kepada golongan tertentu yang mempunyai fungsi dalam masyarakat (dalam hal ini para representatif Putin dan ) untuk mengatur kepentingannya sendiri, baik terikat atau tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Golongan ini dalam melaksanakan tugasnya dapat mencakup lebih dari satu daerah. Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. (2009). *Ilmu Negara*, ed rev. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 85.

<sup>78</sup> Stoliarov. *Ibid.* hlm 34-35

pembagian wewenang pengawasan dari otoritas daerah dengan kekuasaan representatif Putin dalam distrik dan wilayah regional, dijelaskan oleh Putin dalam wawancaranya dengan majalah “*Известия*.” Putin mengatakan:

*“Руководители регионов наделены по закону огромными полномочиями, на которые представители президента не могут посягать по определению. У них сферы деятельности разграничены юридически. Главное здесь в другом - с созданием округов федеральная власть не удалась, а приблизилась к территориям, к их проблемам. И, конечно, речь идет о возвращении в центр федеральных полномочий.”*

“Para pemimpin regional diberkahi dengan kekuatan besar di bawah hukum, dimana representatif presiden tidak dapat melanggar batas definisi. Lingkup kegiatan mereka terpisah secara hukum. Hal utama di sini, di sisi lain - dengan pembentukan distrik federal, kekuasaan federal tidak dapat dihapus, dan lebih dekat ke wilayah untuk masalah mereka. Dan, tentu saja, kita berbicara tentang kembali ke pusat kekuasaan federal.”<sup>79</sup>

Pernyataan Putin dapat dianalisis sebagai penegasan mengenai kedudukan para representatif Putin yang hanya berfungsi sebagai pengawas dan sebagai representatif pemerintah pusat akan otoritas pemerintah federal terhadap pemerintah subjek federasi. Intinya Putin telah memberlakukan sentralisasi dalam hubungannya dengan pemerintah subjek federasi.

Peran Kremlin dalam pelaksanaannya nampak pasti, pada kenyataannya menentukan siapa yang akan ada pada ‘daftar pendek’ dari kandidat untuk ditentukan – dan terkadang memutuskan lebih dulu siapa yang akan menjadi pemenang utama. Representatif presidensial terkadang bukan hanya tidak dimasukkan ke dalam proses penunjukan kepala eksekutif ini, namun pada saatnya merupakan yang terakhir mengetahui tentang pilihan Kremlin.

Saat Putin menominasikan pilihannya dari para kandidat yang diajukan kepadanya, prosesnya berjalan dalam sesuatu yang dijelaskan sebagai ‘*effektivnyj*’. Dalam hal ini, Putin telah memperoleh bantuan dari peningkatan kekuatan partai politik Rusia Bersatu yang terjadi di daerah. Pada akhir 2006, Rusia Bersatu memiliki kursi mayoritas dalam majelis dengan jumlah dua pertiga dari keseluruhan.

---

<sup>79</sup> “*Известия*”, *Op.Cit.*

Gambar 3.3 Daftar Pimpinan Daerah (Gubernur) Juni 2008<sup>80</sup>

| Region                   | Name Regional Leader                     | Since...        | To...         | Politicalaffiliation |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------|
| Adygeia                  | AslanTkhakushinov                        | 13January2007   | January2012   | UnitedRussia         |
| Altai(Republic)          | AleksandrBerdnikov                       | 20January2006   | January2010   | UnitedRussia         |
| Altai(Region)            | AleksandrKarlin                          | 25August2005    | August2009    | UnitedRussia         |
| Amur                     | NikolaiKolesov                           | 1June2007       | June2011      | UnitedRussia         |
| Arkhangelsk              | IlyaMikhailchuk                          | 14April2008     | April2012     | UnitedRussia         |
| Astrakhan                | AleksandrZhilkin                         | 5December2004   | December2009  | UnitedRussia         |
| Bashkortostan            | MurtazaRakhimov                          | 6April1990      | October2011   | UnitedRussia         |
| Belgorod                 | YevgeniiSavchenko                        | October1993     | June2012      | UnitedRussia         |
| Bryansk                  | NikolaiDenin                             | 26December2004  | October2012   | UnitedRussia         |
| Buriatia                 | VyacheslavNagovitsyn                     | 10July2007      | July2012      | UnitedRussia         |
| Chechnya                 | RamsanKadyrov                            | 5April2007      | April2011     | UnitedRussia         |
| Chelyabinsk              | PyotrSumin                               | 22December1996  | April2010     | UnitedRussia         |
| Chuvashia                | NikolaiFedorov                           | 26December1993  | August2010    | UnitedRussia         |
| ChukotkaAutonomousRegion | RomanAbramovich                          | 24December2000  | October2010   |                      |
| Dagestan                 | MukhuAliev                               | 20February2006  | February2010  | UnitedRussia         |
| Ingushetia               | MuratZyazikov                            | 28April2002     | June2010      | UnitedRussia         |
| Irkutsk                  | IgorYesipovskii(temporaryactinggovernor) | 15April2008     | -             | UnitedRussia         |
| Ivanovo                  | MikhailMen                               | 23December2005  | December2010  | UnitedRussia         |
| JewishAutonomousRegion   | NikolaiVolkov                            | 14December1991  | February2010  | UnitedRussia         |
| Kabardino-Balkaria       | ArsenKanokov                             | 28September2005 | September2010 | UnitedRussia         |
| Kaliningrad              | GeorgiiBoos                              | 28September2005 | September2010 | UnitedRussia         |
| Kalmykia                 | KirsanIlyumzhinov                        | 11April1993     | October2010   | UnitedRussia         |
| Kaluga                   | AnatoliiArtamonov                        | 12November2000  | June2010      | UnitedRussia         |
| Kamchatka                | AlexeiKuzmitskii                         | 1July2007       | June2012      | UnitedRussia         |
| Karachaevo-Cherkessia    | MustafaBatdyev                           | 31August2003    | August2008    |                      |
| Karelia                  | SergeiKatanandov                         | 26April1998     | March2011     | UnitedRussia         |

<sup>80</sup> Darrell Slider. *Can it Be Rebuilt from the ruins?*. Russian Analytical Digest 43/8 hal. 5-7. [www.laender-analysen.de/russland](http://www.laender-analysen.de/russland)

|   |                    |                 |              |              |
|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|   |                    |                 |              | a            |
| Kemerovo                                  | Aman-GeldyTuleyev  | 1July1997       | April2010    | UnitedRussia |
| Khabarovsk                                | ViktorIshayev      | 24October1991   | July2011     | UnitedRussia |
| <i>Khakassia</i>                          | AlexeiLebed        | 22December1996  | January2009  | UnitedRussia |
| <i>Khanty-MansiiskAutonomousRegion</i>    | AlexanderFilipenko | 18December1991  | February2010 | UnitedRussia |
| <i>Kirov</i>                              | NikolaiShakleyin   | 21December2003  | December2008 | UnitedRussia |
| <i>Komi</i>                               | VladimirTorlopov   | 16December2001  | January2011  | UnitedRussia |
| <i>Kostroma</i>                           | IgorSliuniaev      | 25October2007   | October2012  | UnitedRussia |
| <i>Krasnodar</i>                          | AlexanderTkachev   | 3December2000   | April2012    | UnitedRussia |
| <i>Krasnoyarsk</i>                        | AlexanderKhloponin | 22September2002 | June2012     | UnitedRussia |
| <i>Kurgan</i>                             | OlegBogomolov      | 8December1996   | December2009 | UnitedRussia |
| <i>Kursk</i>                              | AleksandrMikhailov | 5November2000   | March2010    | UnitedRussia |
| <i>Leningrad(areaaroundSt.Petersburg)</i> | ValeriiSerdyukov   | 19September1999 | July2012     | UnitedRussia |
| <i>Lipetsk</i>                            | OlegKorolev        | 12April1998     | June2010     | UnitedRussia |
| <i>Magadan</i>                            | NikolaiDudov       | 16February2003  | February2013 | UnitedRussia |
| <i>MariiEl</i>                            | LeonidMarkelov     | 4January2001    | January2010  | UnitedRussia |
| <i>Mordovia</i>                           | NikolaiMerkushkin  | 22September1995 | November2010 | UnitedRussia |
| <i>Moscow(City)</i>                       | YuriiLuzhkov       | 12June1992      | July2011     | UnitedRussia |
| <i>Moscow(Region)</i>                     | BorisGromov        | 9January2000    | May2012      | UnitedRussia |
| <i>Murmansk</i>                           | YuriiYevdokimov    | 1December1996   | February2012 | UnitedRussia |
| <i>NenetsAutonomousRegion</i>             | ValeriiPotapenko   | 7August2006     | August2010   | UnitedRussia |
| <i>NizhniiNovgorod</i>                    | ValeriiShantsev    | 8August2005     | August2010   | UnitedRussia |
| <i>NorthOssetia-Alania</i>                | TaimusarMamsurov   | 7June2005       | June2010     | UnitedRussia |
| <i>NovgorodSergeiMitin</i>                |                    | 7August2007     | August2012   | JustRussia   |
| <i>Novosibirsk</i>                        | ViktorTolokonskii  | 9January2000    | July2012     | UnitedRussia |
| <i>Omsk</i>                               | LeonidPolezhayev   | 11November1991  | May2012      | UnitedRussia |
| <i>Orenburg</i>                           | AlexeiChernyshev   | 26December1999  | June2010     | UnitedRussia |
| <i>Orel</i>                               | YegorStroyev       | 11April1993     | April2010    | UnitedRussia |
| <i>Pensa</i>                              | VasiliiBochkarev   | 12April1998     | May2010      | JustRussia   |
| <i>Perm</i>                               | OlegChirkunov      | 1December2005   | December2010 |              |
| <i>Primorye</i>                           | SergeDarkin        | 17June2001      | February2010 | UnitedRussia |
| <i>Pskov</i>                              | MikhailKuznetsov   | 17December2004  | December2009 | UnitedRussia |



|  |                       |                   |               |               |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <i>Rostov</i>                          | Vladimir Chub         | 29 September 1996 | June 2010     | United Russia |
| <i>Ryazan</i>                          | Oleg Kovalev          | 12 April 2008     | April 2013    | United Russia |
| <i>St. Petersburg</i>                  | Valentina Matviyenko  | 5 October 2003    | December 2011 | United Russia |
| <i>Samara</i>                          | Vladimir Artiakov     | 29 August 2007    | August 2012   | United Russia |
| <i>Sakha (Yakutia)</i>                 | Vyacheslav Shtyrov    | 13 January 2002   | January 2012  | United Russia |
| <i>Sakhalin</i>                        | Alexander Khoroshavin | 11 August 2007    | August 2011   | United Russia |
| <i>Saratov</i>                         | Pavel Ipatov          | 5 April 2005      | April 2010    | United Russia |
| <i>Smolensk</i>                        | Sergei Antufyev       | 24 December 2007  | December 2010 | United Russia |
| <i>Stavropol</i>                       | Valerii Gayevskii     | 23 May 2008       | May 2012      | United Russia |
| <i>Sverdlovsk</i>                      | Eduard Rossel         | 13 August 1995    | November 2009 | United Russia |
| <i>Tambov</i>                          | Oleg Betin            | 27 December 1999  | July 2010     | United Russia |
| <i>Tatarstan</i>                       | Mintimer Shaimiyev    | 1989              | March 2010    | United Russia |
| <i>Tomsk</i>                           | Viktor Kress          | 17 December 1995  | March 2012    | United Russia |
| <i>Tula</i>                            | Vyacheslav Dudka      | 29 April 2005     | April 2010    | United Russia |
| <i>Tver</i>                            | Dmitrii Zelenin       | December 2003     | July 2012     | United Russia |
| <i>Tyumen</i>                          | Vladimir Yakushev     | 24 November 2005  | November 2010 | United Russia |
| <i>Tyva</i>                            | Sholban Kara-ool      | 6 April 2007      | April 2012    | United Russia |
| <i>Udmurtia</i>                        | Alexander Volkov      | April 1995        | March 2009    | United Russia |
| <i>Ulyanovsk</i>                       | Sergei Morozov        | December 2004     | April 2011    | United Russia |
| <i>Vladimir</i>                        | Nikolai Vinogradov    | 8 December 1996   | March 2009    | Communist     |
| <i>Volgograd</i>                       | Nikolai Maksyuta      | 29 December 1996  | December 2009 | Communist     |
| <i>Vologda</i>                         | Vyacheslav Posgalev   | 6 October 1996    | June 2012     | United Russia |
| <i>Voronezh</i>                        | Vladimir Kulakov      | 24 December 2000  | March 2009    | United Russia |
| <i>Yamalo-Nenets Autonomous Region</i> | Yurii Neelov          | 16 March 2005     | March 2010    | United Russia |
| <i>Yaroslavl</i>                       | Sergei Vakhrukov      | 25 December 2007  | December 2012 | United Russia |
| <i>Zabaikalye</i>                      | Ravil Geniatulin      | 1 February 1996   | March 2013    | United Russia |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwa kemenangan kepala eksekutif di daerah mayoritas mayoritas oleh Partai Rusia Bersatu. Partai ini mengajukan prosedur baru yang dapat memberikan kepada partai yang menang dalam pemilihan regional dan menjadi legislatur untuk memberi hak saran atas

kandidat eksekutif regional. Para dewan kemudian memilih untuk menyerahkan proses kandidat kepada presiden. Presiden kemudian akan melihat kembali seleksi dan secara formal menominasikan kandidat kepada legislatur (Darell Slider: 2009, 113).

Penguatan kekuasaan vertikal Putin terhadap kekuasaan di daerah terbukti dari beberapa kasus seperti, pemecatan gubernur Koryak dari avtonomnyj okrug, Vladimir Loginov, pada bulan Maret 2005 atas kegagalan untuk mempersiapkan suplai pangan daerahnya dari musim dingin. (Perpanjangan kekuatan ini sebenarnya dapat dipertanyakan. Bahkan pada termin pertamanya Putin dapat menekan seorang gubernur yang memiliki posisi kuat, Yevgenii Nazfratenko, untuk menyerahkan jabatannya sebagai gubernur Primorsky kray untuk mengepalai kementerian perikanan di Moskow.) Mikhail Yevdokimov di Altay kray, mantan komedian televisi, tidak dipindahkan ataupun ditunjuk kembali oleh Putin. Pada bulan Agustus 2005 Yevdokimov terbunuh dalam kecelakaan mobil.

Untuk lebih jelasnya pada contoh kasus lainnya adalah kasus pelanggaran hukum seorang gubernur yang dicopot dari jabatannya karena perlakuan kriminalnya. Pada bulan Juli 2006, gubernur ini adalah gubernur terakhir yang dipilih secara pemilihan umum (Januari 2005), Aleksey Barinov dari avtonomnyj okrug Nenets dibubarkan oleh Putin. Barinov telah didakwa pada bulan Mei 2006 oleh penuntut umum di oblast Arkhangel'sk dengan dakwaan penipuan sebelum ia menjabat sebagai gubernur. Gubernur pertama yang ditunjuk kembali adalah Sergey Dar'kin pada Februari 2005 di Primorsky kray. Mungkin dari semua gubernur ia yang paling sering dicurigai atas keterkaitannya dengan kelompok kriminal yang mengontrol porsi substantif dari ekonomi daerahnya. Dalam sejumlah kasus lain, pelaksanaan tuntutan kriminal tidak menyebabkan pencopotan dari jabatan (para pimpinan regional ini termasuk Butov di Nenets AO, Platov di Tver', Lisitsyn di Yaroslavl', Shpak di Ryazan', Titov in Samara, Lebed' di Kavkasiya, dan Mashkovtsev di Kamchatka), walaupun tekanan dari penuntut umum secara jelas mengirim pesan yang kuat kepada pemegang jabatan untuk mendemonstrasikan kesetiaannya.

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat terlihat bahwa Putin tidak menunjukkan tanda bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap memerangi korupsi dan stagnasi politik pada tingkat regional seperti pada tujuan utama dari kebijakan diktator hukum yang bertujuan menjerat kaum oligarkhi yang korup pada masa pemerintahan Yeltsin. Namun kediktatoran hukum tersebut dalam prakteknya justru mempengaruhi penguatan otoritas pemerintah pusat atas pemerintah daerah.

Beberapa contoh dari gubernur yang ditunjuk kembali telah berada pada jabatannya untuk beberapa termin dan menguatkan dirinya baik dalam perangkat administratif maupun diantara kaum elit ekonomi daerah. Yegor Stroev, untuk contohnya, berada diantara gubernur yang dipilih kembali. Dia merupakan satu-satunya gubernur yang pernah menjadi anggota CPSU Komite Sentral dan Politburo pada masa Soviet dan masih menjadi gubernur dari Orel oblast saat ia berumur 70 tahun pada Februari 2007 (di Rusia umur pensiun rata-rata bagi pria adalah 60). Pada kasus nepotisme, Stroev menunjuk putrinya untuk menjadi senator dari daerah. Serta mengacu kepada kepala dari kelompok lobby-dagang kecil di daerah, 'hanya urusan dagang yang terhubung kepada Stroev, keluarganya dan kerabat dekat yang memiliki kesempatan untuk berkembang di daerah kami'.<sup>81</sup> Walikota Moskow Yuri Luzhkov telah menjabat sejak 1992. Ia merupakan satu-satunya walikota di dunia yang istrinya (Yelena Baturina) seorang miliarder, semua 'diperoleh' dari perusahaan konstruksinya saat Luzhkov menjabat dan kebanyakan diperoleh melalui proyek yang dibawah kontrol kota. Diantara eksekutif yang menjabat paling lama adalah sejumlah pimpinan dari republik etnik, termasuk Bashkortostan, Tatarstan, Tyva, dan Kalmykiya. Semua telah menjadi presiden dari republik sejak 1993. Mintimer Shaimiev, salah satu dari yang ditunjuk kembali untuk menjabat, juga berusia 70 tahun pada 2007 dan telah menjadi pemimpin Tatarstan sejak 1991. Presiden Bashkortostan Murtaz Rakhimov berusia 71 tahun saat ia ditunjuk kembali pada 2005, yang dipandang

---

<sup>81</sup> Francesca Mereu, 'Governors Facing a Struggle for Survival', The Moscow Times, 18 March 2005.

[www.new.themoscowtimes.com/news/article/governors-facing-a-struggle-for-survival/227748](http://www.new.themoscowtimes.com/news/article/governors-facing-a-struggle-for-survival/227748).

secara luas sebagai pimpinan daerah paling otoritarian dan juga ia sempat menaruh anaknya pada posisi konglomerat penting di sektor energi daerah.<sup>82</sup>

Dalam hal ini, kebijakan diktator hukum telah terjadi dalam kaitannya dengan penguatan garis vertikal terhadap kepala eksekutif dimana “kesewenangan” dapat diberlakukan tanpa alasan yang jelas, namun dibenarkan atas dasar “sesuai dengan aturan hukum” pemerintah pusat. Gaya pemerintahan Putin yang sentralistik diterapkan dalam sebuah bentuk negara federasi. Sehingga Rusia memiliki sebuah konsep federalismenya yaitu federalisme sentralistik. Federalisme dan sentralistik adalah dua hal yang tidak dapat disatukan sebagai sebuah konsep. Federalisme identik dengan kebebasan individu, sedangkan sentralistik identik dengan sistem kekuasaan yang terpusat. Namun dua hal yang kontradiksi tersebut dapat diterapkan dalam praktek kenegaraan di Rusia.

---

<sup>82</sup> Darrell Slider dalam Cameron Ross and Adrian Campbell, *Op.Cit*, hlm 115.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Federasi sebagai salah satu bentuk negara dapat diasumsikan sebagai ikatan negara-negara berdaulat yang berkomitmen dalam proses integrasi nasionalnya untuk menjadi satu ikatan federal yang didasarkan atas keinginan untuk bekerjasama dalam ikatan kesatuan yang kuat tanpa menghilangkan kedaulatan dari masing-masing negara berdaulat tersebut. Semakin tinggi integrasi nasional masyarakatnya untuk bersatu, semakin kuat ikatan kesatuan negara tersebut dan sebaliknya. Semakin kuat ikatan kesatuan tersebut, maka yang terjadi adalah bentuk negara kesatuan. Semakin lemah ikatan kesatuan tersebut yang terbentuk adalah konfederasi. Sedangkan federasi berada di pertengahan antara kesatuan dan konfederasi. Maka pada dasarnya konsep federasi yang lahir di Amerika adalah federalisme yang mendasarkan pada kebebasan individu. Karena di satu sisi kebebasan atau kedaulatan negaranya tidak ingin hilang, namun membutuhkan ikatan kesatuan dengan negara-negara berdaulat lainnya atas persamaan nasib dan tujuan dalam bernegara.

Setiap negara yang menggunakan sistem federasi perlu menanamkan sebuah konsep federalismenya yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan bernegara dari negara-negara tersebut. Karena tidak semua negara dapat meletakkan liberalisme seperti Amerika Serikat dalam konsep Feeralisme mereka. Jika tidak maka negara tersebut hanyalah menggunakan federasi sebagai suatu cara untuk memudahkan mengatur pemerintahan tanpa sebuah konsep.

Federasi Rusia yang terdiri dari multinasional memutuskan untuk menjadi satu ikatan negara dalam yang dirumuskan dalam konstitusi Federasi Rusia tahun 1993. Bentuk federasi yang dipilih oleh Rusia juga merupakan warisan Uni Soviet yang berbentuk federasi juga dan terdiri atas pluralisme negara, bangsa dan etnis. Oleh karena itu Federasi Rusia pasca runtuhnya komunisme yang sedang mengarahkan diri pada demokrasi, mencoba meletakkan komitmen demokrasi mereka kepada kebebasan individu dan liberalisme di dalam wadah federalisme mereka. Namun hal itu tidak dapat berjalan dengan cara revolusi, karena pada praktiknya hanyalah bermunculan kaum oligarkhi yang menguasai sektor-sektor

perekonomian yang penting dan peranan dalam pemerintahan, serta kecenderungan otoritarian dari para eksekutif di subjek-subjek federasi. Hal ini menandakan bahwa integrasi nasional dari setiap subjek federasi masih sangat lemah. Maka revolusi demokrasi yang dilakukan dengan penekanan liberalisme memiliki kelemahan untuk diterapkan di Rusia. Salah faktornya adalah tradisi kekuasaan *dherzavnost'* yang masih mengakar di Rusia. Bahkan masih ada di dalam tubuh-tubuh mantan-mantan pejabat pemerintah, militer, dan KGB pada zaman Uni Soviet yang masih berpikiran konservatisme. Salah satunya adalah Vladimir Putin yang merupakan mantan anggota KGB pada masa Uni Soviet. Naiknya Putin menggantikan Yeltsin pada pemilihan umum presiden tahun 2000 memberikan fenomena besar bagi bangsa Rusia dan perkembangannya.

Putin menyadari adanya tradisi kekuasaan yang masih sangat kental dalam budaya masyarakat Rusia. Maka Ia menetapkan sebuah kebijakan diktator hukum yang bertujuan mereformasi permasalahan ekonomi pasar yang berdampak buruk bagi stabilitas sosial dan politik di Rusia. Namun dasar pemikiran Putin menerapkan kebijakan diktator hukum adalah sebuah konsep “keamanan nasional Rusia” yang bertujuan menguatkan aturan konstitusional yang mengarah kepada tertib hukum serta menjaga kedaulatan dan integritas negara. Dari dasar pemikiran ini dapat dilihat bahwa Putin mengedepankan konsep nasionalisme dalam kebijakan diktator hukumnya. konsep keamanan nasional, yang terefleksikan dalam kebijakan diktator hukum membuat Putin juga mereformasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sistem pemilihan pada kepala-kepala eksekutif di subjek federasi menjadi sistem penunjukan melalui kandidat-kandidat yang diajukan oleh presiden Putin sendiri. Pelaksanaan kebijakan diktator hukum putin juga dilakukan dengan membagi 89 subjek federasi Rusia atas 7 distrik administratif. Putin meletakkan orang-orang kepercayaannya (para representatif) yang sebagian besar juga berasal dari *siloviki* sebagai perpanjangan tangan Putin untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Hal ini dapat dipandang sebagai penguatan kekuasaan vertikal Putin dalam mengontrol pemerintah-pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu bentuk federasi Rusia pada era Putin

dapat dikatakan kuasi-federasi sebagai suatu sistem federatif yang merupakan bentuk dari federasi dengan lain cara karena faktor integrasi nasional diperkuat dengan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat atas pemerintah daerah melalui kebijakan diktator hukum. Namun kuasi-federasi tidaklah berarti kesatuan, karena hanya integrasi nasionalnya yang diperkuat ke arah kesatuan, namun ada hal-hal yang dipertahankan sehingga tetap menjadi sebuah bentuk federasi, yaitu konsep multinasionalis yang tetap memiliki hak untuk mengembangkan budaya daerahnya masing-masing. Maka Federalisme Rusia masa Putin memiliki konsepnya sendiri yaitu federalisme sentralistik yang berarti adanya penguatan rasa nasionalisme untuk negara dan adanya negara yang kuat dengan aturan hukumnya dan memberi kepastian dan stabilitas ekonomi dan politik bagi warganegaranya. Prosedur administrasi pemerintahan dilakukan dengan sistem terpusat dan penguatan hirarki vertikal oleh pemerintah pusat atas pemerintah subjek federasi. Maka gaya pemerintahan yang sentralistik diletakkan dalam sebuah wadah federalisme yang identik dengan kebebasan individu. Meskipun kedua termin tersebut yaitu federalisme dan sentralisme adalah kedua hal yang tidak dapat digabungkan sebagai sebuah konsep, namun hal tersebut dapat diterapkan dalam praktek kenegaraan di Rusia pada periode Vladimir Putin 2000-2008.

## DAFTAR REFERENSI

- Alkatiri, Zeffry. 2007. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia Analisis Perlindungan HAM 1991-2000*, cet 1. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet 14. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Busro, Abubakar, Abu Daud Busro. 1985. *Hukum Tata Negara*, cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahrurodji, A. 2005. *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gottschalk, Luis. 1975. *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- H., Soetrisno P. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Indonesia: Penerbit Andi.
- Kahn, Jeffrey. 2002. *Federalism, democratization, and the rule of law in Russia*. Oxford University Press
- Khilnani, Niranjana M. 1993. *Emergence of New Russia*. New Delhi: Anmol Publication.
- King, Preston. T. 1982. *Federalism and Federation*. London: Taylor & Francis.
- Konitzer, Andrew. 2005. *Voting for Russia's Governors*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press.



- Mankoff, Jeffrey. 2009. *Russian Foreign Policy*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Martinez-Vazques, Jorge & Jameson Boex. 2001. *Russia's Transition to a New Federalism*. World Bank Publications.
- Musanef. 1993. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, cet 4. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan & Otda (rev)*. Grasindo.
- Panikkar, K.M. 1956. *The Principle and Practice of Diplomacy*. Asia Publishing House
- Ross Cameron and Adrian Campbell. (2009). *Federalism and Local Politics in Russia*. London and new York: Routledge. hlm 106-107.
- Stoliarov, Mikhail. 2003. *Federalism and The Dictatorship of Power in Russia*. New York: Routledge
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. 2009. *Ilmu Negara*, ed rev. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wahjono, Padmo. 1996. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*. Jakarta: Ind-Hill Co.

**Publikasi Elektronik:**

- “*Siloviki*” in politics – *Russian Military Reform* , diunduh pada 19 Juni 2010  
<http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=29428>
- Francesca Mereu, ‘Governors Facing a Struggle for Survival’, The Moscow Times, 18 March 2005.  
[www.new.themoscowtimes.com/news/article/governors-facing-a-struggle-for-survival/227748](http://www.new.themoscowtimes.com/news/article/governors-facing-a-struggle-for-survival/227748).
- Gel'man, Vladimir. “*The Dictatorship of Law in Russia: Neither Dictatorship, Nor Rule of Law*”, PONARS Policy Memo 146, European University at St. Petersburg, Oktober 2000. [http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm\\_0146.pdf](http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0146.pdf)  
 diakses pada

Harper, Douglas. *Online Etymology Dictionary, 2001-2010*.  
<http://www.etymonline.com/index.php?l=f&p=5> diunduh pada 6/6/2010,  
 pada pukul 11:34.

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_law/2176/](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2176/). Diakses pada tanggal 5 Juni 2010  
 pukul 05.26

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16551>, diunduh pada tanggal 15 Juni 2010.

<http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=174>, diakses pada 30/05/2010, pada  
 pukul 20.53

[http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial\\_detail.asp?id=274](http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=274)

<http://www.etymonline.com/index.php?l=f&p=5> diunduh pada 6 april 2010, pada  
 pukul 11:34.

<http://www.jstor.org/stable/3330829>, diunduh pada 20 Januari 2010, pada pukul  
 23:56

<http://www.ushistory.org/documents/confederation.htm>, diunduh pada tanggal 25  
 april 2010 pukul 13.00

<http://www.ushistory.org/documents/constitution.htm> diakses pada tanggal 20  
 Januari 2010 pada pukul 17.30

Kryshtanovskaya, Olga and Stephen White. *Putin's Militocracy*.  
[www.russiafoundation.org/showfile.php?name=putins\\_militocracy.pdf](http://www.russiafoundation.org/showfile.php?name=putins_militocracy.pdf)

*Russian Federation* <http://www.traveldocs.com/ru/govern.htm> diakses pada 17  
 Januari 2010 pada pukul 14.30

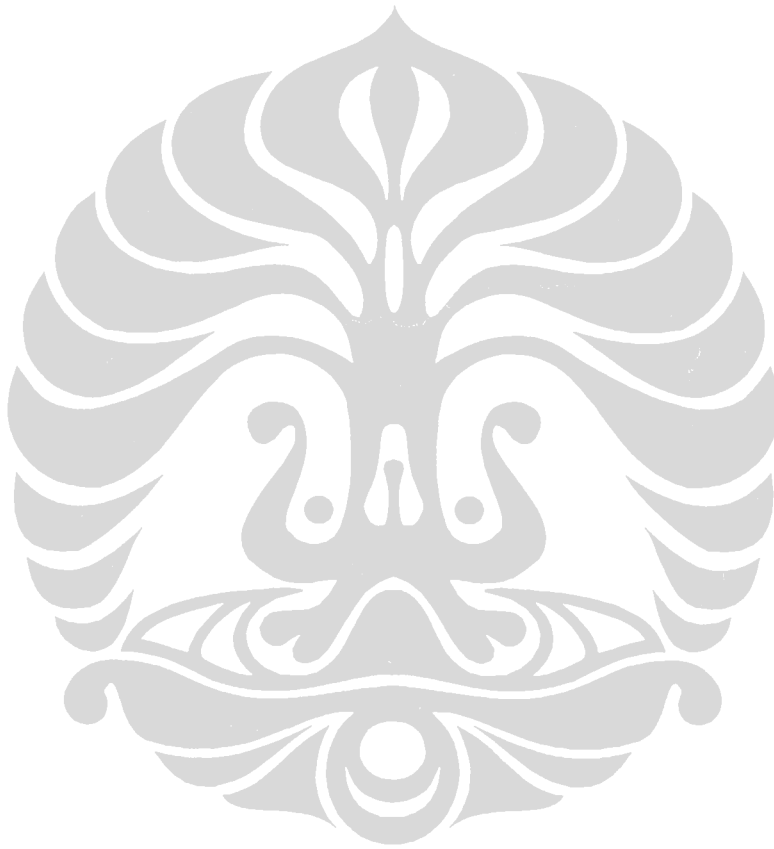
Slider, Darrell. *Can it Be Rebuilt from the ruins?*. Russian Analytical Digest 43/8  
 <[www.laender-analysen.de/russland](http://www.laender-analysen.de/russland)>

*Subjek Federasi*. [http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl\\_sch2.cgi?RRzh&lqy:  
 !Quxxopxqup!Uklwg.oo](http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRzh&lqy:!Quxxopxqup!Uklwg.oo) diakses pada

Verney, Douglas. V. *Federalism, Federative Systems, and Federations: The  
 United States, Canada, and India*. Publius, Vol. 25, No. 2 (1995), hlm. 81-  
 97, Oxford University Press <http://www.jstor.org/stable/3330829>, diunduh  
 pada 20/01/2010, pada pukul 23:56

*Интервью Президента Российской Федерации В.В.Путина газете "Известия" опубликовано 14 июля 2000 года. Dikutip dari <<http://2002.kremlin.ru/events/46.html>>.*

*Конституция Российской Федерации. <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2010 pada pukul 22.17*



|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |

Алфавитно-предметный  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т

# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Русский | English | Français

Вид на Кремль

Поиск:

Вид на Кремль

## Конституция Российской Федерации

[Оптическая копия  
официального издания](#)

[Государственная  
власть РФ](#)

[Государственные  
символы РФ](#)

[Постановления  
Конституционного  
Суда РФ](#)

[Постановление  
Пленума  
Верховного Суда РФ](#)

[www.const](#)

[Гарант-Ин](#)

[НПП  
"Гарант-С"](#)

[SpyLOG](#)

[Rambler's  
Топ-100](#)

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Род перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем **КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

### Раздел первый. [Основные положения](#)

Глава 1. [Основы конституционного строя](#) (ст. 1-16)

Глава 2. [Права и свободы человека и гражданина](#) (ст. 17-64)

Глава 3. [Федеративное устройство](#) (ст. 65-79)

Глава 4. [Президент Российской Федерации](#) (ст. 80-93)

Глава 5. [Федеральное Собрание](#) (ст. 94-109)

Глава 6. [Правительство Российской Федерации](#) (ст. 110-117)

Глава 7. [Судебная власть](#) (ст. 118-129)

Глава 8. [Местное самоуправление](#) (ст. 130-133)

Глава 9. [Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#) (ст. 134-137)

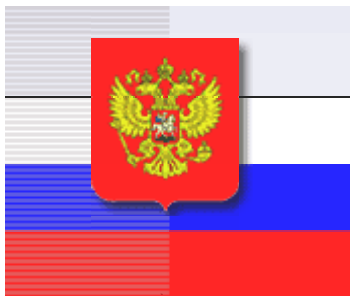
### Раздел второй. [Заключительные и переходные положения](#)

[скачать в ZIP формате](#) (39 I

[Справка о принятии, опубликовании и внесении изменений в Конституцию РФ](#)

Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#)  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)



# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации



### Раздел I:

### Раздел первый. Основные положения

#### Глава 1

Основы конституционного строя  
(ст. 1-16)

#### Глава 1. Основы конституционного строя

##### Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

#### Глава 2

Права и свободы человека и гражданина  
(ст. 17-64)

#### Глава 3

Федеративное устройство  
(ст. 65-79)

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.

#### Глава 4

Президент Российской Федерации  
(ст. 80-93)

##### Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

#### Глава 5

Федеральное Собрание  
(ст. 94-109)

##### Статья 3

#### Глава 6

Правительство Российской Федерации  
(ст. 110-117)

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

#### Глава 7

Судебная власть  
(ст. 118-129)

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

#### Глава 8

Местное самоуправление  
(ст. 130-133)

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

#### Глава 9

Конституционные поправки и пересмотр Конституции  
(ст. 134-137)

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

##### Статья 4

### Раздел II: Заключительные и

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется всю ее территорию.

[Справка](#)



2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

### Статья 5

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свои уставы и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

### Статья 6

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

### Статья 7

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семей

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

## **Статья 8**

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

## **Статья 9**

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

## **Статья 10**

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

## **Статья 11**

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.

## **Статья 12**

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

### **Статья 13**

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

### **Статья 14**

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

### **Статья 15**

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.



4. Общеизвестные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

## Статья 16

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

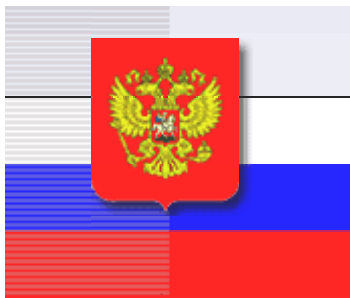
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.



Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)



# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации



### Раздел I:

## Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

### Глава 1

[Основы конституционного строя](#)  
(ст. 1-16)

### Глава 2

[Права и свободы человека и гражданина](#)  
(ст. 17-64)

### Глава 3

[Федеративное устройство](#)  
(ст. 65-79)

### Глава 4

[Президент Российской Федерации](#)  
(ст. 80-93)

### Глава 5

[Федеральное Собрание](#)  
(ст. 94-109)

### Глава 6

[Правительство Российской Федерации](#)  
(ст. 110-117)

### Глава 7

[Судебная власть](#)  
(ст. 118-129)

### Глава 8

[Местное самоуправление](#)  
(ст. 130-133)

### Глава 9

[Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#)  
(ст. 134-137)

### Раздел II:

[Заключительные и](#)

### Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина должно нарушать права и свободы других лиц.

### Статья 18

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

### Статья 19

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

### Статья 20

**Справка**



1. Каждый имеет право на жизнь.

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права рассмотрения его дела судом с участием присяжных заседателей.

**Статья 21**

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

**Статья 22**

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражу допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

**Статья 23**

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

**Статья 24**

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

**Статья 25**

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

#### **Статья 26**

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

#### **Статья 27**

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

#### **Статья 28**

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

#### **Статья 29**

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

### **Статья 30**

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

### **Статья 31**

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

### **Статья 32**

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избираться и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избираться и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.

### **Статья 33**

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

### **Статья 34**

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

## Статья 35

1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе по решению суда. Принудительное отчуждение имущества государственных нужд может быть произведено только на условиях предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.

## Статья 36

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.

## Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

## Статья 38

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

### **Статья 39**

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

### **Статья 40**

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законами нормами.

### **Статья 41**

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

3. Соккрытие должностными лицами фактов и обстоятельств создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за со ответственность в соответствии с федеральным законом.

#### **Статья 42**

Каждый имеет право на благоприятную окружающую сре достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще ущерба, причиненного его здоровью или имущес экологическим правонарушением.

#### **Статья 43**

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатнс дошкольного, основного общего и среднего профессиональн образования в государственных или муниципаль образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получ высшее образование в государственном или муниципаль образовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители лица, их заменяющие, обеспечивают получение дети основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федералы государственные образовательные стандарты, поддержке различные формы образования и самообразования.

#### **Статья 44**

1. Каждому гарантируется свобода литературно художественного, научного, технического и других ви творчества, преподавания. Интеллектуальная собственнс охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизн пользование учреждениями культуры, на доступ к культурн ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении историческог культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

#### **Статья 45**

1. Государственная защита прав и свобод человека гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы вс способами, не запрещенными законом.



## **Статья 46**

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

## **Статья 47**

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.

## **Статья 48**

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

## **Статья 49**

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

## **Статья 50**

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить помилования или смягчения наказания.

#### **Статья 51**

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

#### **Статья 52**

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

#### **Статья 53**

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

#### **Статья 54**

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

#### **Статья 55**

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

#### **Статья 56**

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться в исключительных случаях в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации.

#### **Статья 57**

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

#### **Статья 58**

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

#### **Статья 59**

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если вследствие убеждений или вероисповедания противоречит неся военной службе, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

#### **Статья 60**

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

### **Статья 61**

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

### **Статья 62**

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

3. Иностранцы граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

### **Статья 63**

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения (или бездействие), не признаваемые Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных к отбыванию наказания в других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации.

### **Статья 64**

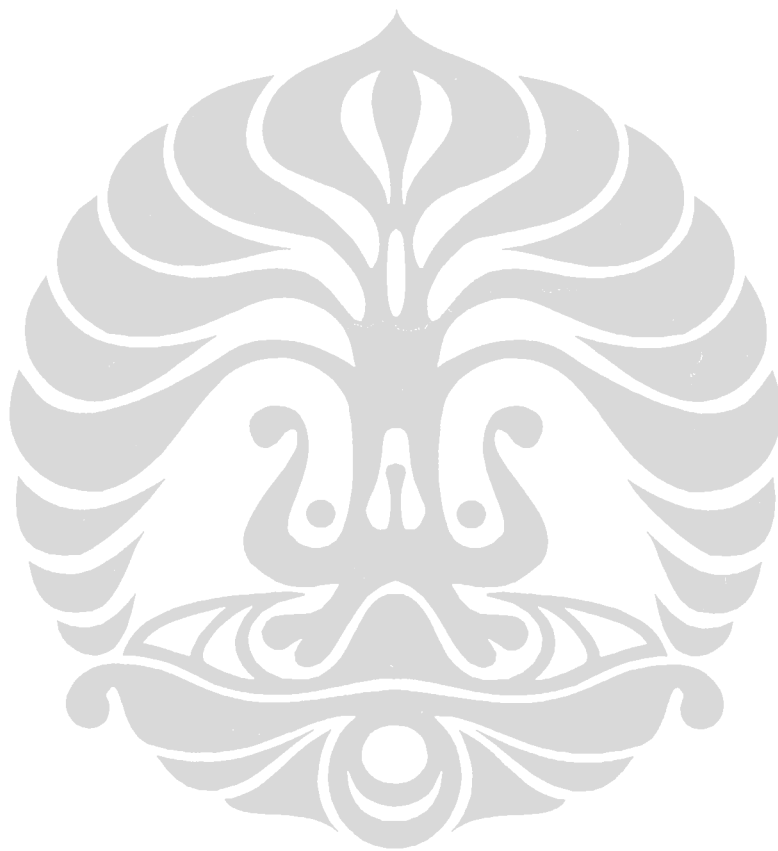
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

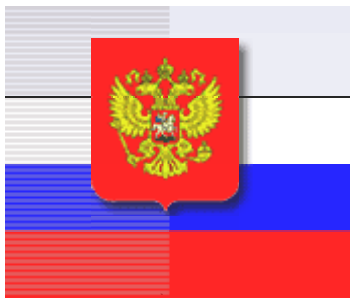


Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

Конституция | Оптическая копия | Государственные символы |  
Постановления КС | Постановление ВС

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Серви](#)





# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации



### Раздел I:

### Глава 3. Федеративное устройство

#### Глава 1

[Основы конституционного строя](#)  
(ст. 1-16)

#### Глава 2

[Права и свободы человека и гражданина](#)  
(ст. 17-64)

#### Глава 3

[Федеративное устройство](#)  
(ст. 65-79)

#### Глава 4

[Президент Российской Федерации](#)  
(ст. 80-93)

#### Глава 5

[Федеральное Собрание](#)  
(ст. 94-109)

#### Глава 6

[Правительство Российской Федерации](#)  
(ст. 110-117)

#### Глава 7

[Судебная власть](#)  
(ст. 118-129)

#### Глава 8

[Местное самоуправление](#)  
(ст. 130-133)

#### Глава 9

[Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#)  
(ст. 134-137)

### Раздел II:

[Заключительные и](#)

### Статья 65

1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения

Еврейская автономная область;

**Справка**



Агинский Бурятский автономный округ, Коми-Пермяц автономный округ, Корякский автономный округ, Ненец автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в составе нового субъекта осуществляются в порядке установленном федеральным конституционным законом.

**Статья 66**

1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики.

2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации.

3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной области, автономном округе.

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться федеральным законом, договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области.

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании части статьи](#)*

**Статья 67**

1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.

#### **Статья 68**

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик используются наряду с государственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

#### **Статья 69**

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

#### **Статья 70**

1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом.

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом.

#### **Статья 71**

В ведении Российской Федерации находятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;



д) федеральная государственная собственность и управление ею;

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

о) судостроительство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия, картография; наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;

т) федеральная государственная служба.

*Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании статьи 71 (пункт "з"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации*

## **Статья 72**

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;

н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа.

### **Статья 73**

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

### **Статья 74**

1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

### **Статья 75**

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.

### **Статья 76**

1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы, федеральные законы, имеющие прямое действие на территории Российской Федерации.

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.

4. Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании статей 71 \(пункт "з"\), 76 \(часть 1\) и 112 \(часть 1\) Конституции Российской Федерации](#)*

## **Статья 77**

1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Федерации.

## Статья 78

1. Федеральные органы исполнительной власти осуществления своих полномочий могут создавать с территориальные органы и назначать соответствующим должностных лиц.

2. Федеральные органы исполнительной власти соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий.

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на территории Российской Федерации.

## Статья 79

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.

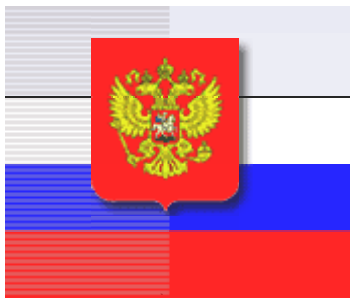


Алфавитно-предметный указатель

[А](#) [Б](#) [В](#) [Г](#) [Д](#) [Ж](#) [З](#) [И](#) [К](#) [Л](#) [М](#) [Н](#) [О](#) [П](#) [Р](#) [С](#) [Т](#) [У](#) [Ф](#) [Ц](#) [Ч](#) [Я](#)

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "[Гарант-Интернет](#)", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)



Поиск:

Алфавитно-предметны  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т

Русский | English | Français

# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## Конституция Российской Федерации

### Глава 4. Президент Российской Федерации

#### Раздел I:

##### Глава 1

Основы конституционного строя  
(ст. 1-16)

##### Глава 2

Права и свободы человека и гражданина  
(ст. 17-64)

##### Глава 3

Федеративное устройство  
(ст. 65-79)

##### Глава 4

Президент Российской Федерации  
(ст. 80-93)

##### Глава 5

Федеральное Собрание  
(ст. 94-109)

##### Глава 6

Правительство Российской Федерации  
(ст. 110-117)

##### Глава 7

Судебная власть  
(ст. 118-129)

##### Глава 8

Местное самоуправление  
(ст. 130-133)

##### Глава 9

Конституционные поправки и пересмотр Конституции  
(ст. 134-137)

#### Раздел II:

Заключительные и

#### Статья 80

1. Президент Российской Федерации является главой государства.

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

#### Статья 81

1. Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

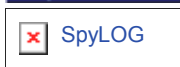
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом.

#### Статья 82

**Справка**



1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:

"Клянусь при осуществлении полномочий Президент Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу"

2. Присяга приносится в торжественной обстановке присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.

**Статья 83**

Президент Российской Федерации:

а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации;

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;

в) принимает решение об отставке Председателя Правительства Российской Федерации;

г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации и вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;

и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;

к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации;

л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;

м) назначает и отзывает после консультаций соответствующими комитетами или комиссиями палаты Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.

## Статья 84

Президент Российской Федерации:

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;

б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;

г) вносит законопроекты в Государственную Думу;

д) подписывает и обнародует федеральные законы;

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании статьи 84 \(пункт "б"\), 99 \(части 1, 2 и 4\) и 109 \(часть 1\)](#)*

## Статья 85

1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.



## Статья 86

Президент Российской Федерации:

- а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
- б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
- в) подписывает ратификационные грамоты;
- г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей.

## Статья 87

1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.

2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях военное положение незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Государственной Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом.

## Статья 88

Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях чрезвычайное положение незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Государственной Думе.

## Статья 89

Президент Российской Федерации:

- а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища;
- б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания;
- в) осуществляет помилование.

## Статья 90

1. Президент Российской Федерации издает указы распоряжения.

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации федеральным законам.

## Статья 91

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу По делу о толковании положений статей 91 и 92 \(часть](#)*

## Статья 92

1. Президент Российской Федерации приступает исполнению полномочий с момента принесения им присяги прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания должности с момента принесения присяги вновь избран Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках к Конституции Российской Федерации.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу По делу о толковании положений статей 91 и 92 \(часть](#)*

## Статья 93

1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выданного Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключении Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одних третей депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.

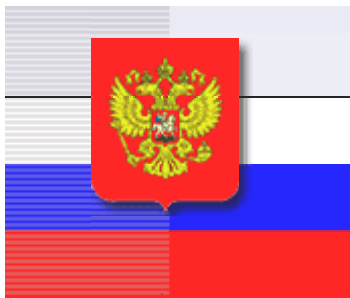
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности должно быть принято позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если этот срок истечет, решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным.



Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)



# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации



### Раздел I:

## Глава 5. Федеральное Собрание

### Глава 1

Основы конституционного строя  
(ст. 1-16)

### Глава 2

Права и свободы человека и гражданина  
(ст. 17-64)

### Глава 3

Федеративное устройство  
(ст. 65-79)

### Глава 4

Президент Российской Федерации  
(ст. 80-93)

### Глава 5

Федеральное Собрание  
(ст. 94-109)

### Глава 6

Правительство Российской Федерации  
(ст. 110-117)

### Глава 7

Судебная власть  
(ст. 118-129)

### Глава 8

Местное самоуправление  
(ст. 130-133)

### Глава 9

Конституционные поправки и пересмотр Конституции  
(ст. 134-137)

### Раздел II:

Заключительные и

### Статья 94

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом Российской Федерации.

### Статья 95

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.

2. В Совет Федерации входят по два представителя каждого субъекта Российской Федерации: по одному представительного и исполнительного органов государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

### Статья 96

1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года

2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.

### Статья 97

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом или представителем органов государственной власти и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают

**Справка**



профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

### Статья 98

1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.

### Статья 99

1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.

2. Государственная Дума собирается на первое заседание тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат.

4. С момента начала работы Государственной Думы новые созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

### Статья 100

1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.

2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.

### Статья 101

1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя

Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей.

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его заместители ведают заседаниями и ведают внутренним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.

## **Статья 102**

1. К ведению Совета Федерации относятся:

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;

ж) назначение на должность и освобождение от должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

### **Статья 103**

1. К ведению Государственной Думы относятся:

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;

в) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом;

е) объявление амнистии;

ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности.

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу по делу о толковании статей 103 \(часть 3\), 105 \(части 2 и 5\), 107 \(часть 3\), 108 \(часть 2\), \(часть 3\) и 135 \(часть 3\)](#)*

### **Статья 104**

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также

Конституционному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

## **Статья 105**

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совету Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании статей 103 \(часть 3\), 105 \(части 2 и 5\), 107 \(часть 3\), 108 \(часть 2\), \(часть 3\) и 135 \(часть 3\) и 135 \(часть 3\) и 135 \(часть 3\)](#)*

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании частей статьи 105 и статьи 105 и статьи 105](#)*

## **Статья 106**

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;



- б) федеральных налогов и сборов;
- в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
- г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
- д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
- е) войны и мира.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании частей статьи 105 и статьи](#)*

### **Статья 107**

1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании статей 103 \(часть 3\), 105 \(части 2 и 5\), 107 \(часть 3\), 108 \(часть 2\), \(часть 3\) и 135 \(часть](#)*

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании отдельных положений статьи](#)*

### **Статья 108**

1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации

обнародованию.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании статей 103 \(часть 3\), 105 \(части 2 и 5\), 107 \(часть 3\), 108 \(часть 2\), \(часть 3\) и 135 \(часть 3\)](#)*

## Статья 109

1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных [статьями 111](#) и [117](#) Конституции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее, чем через четыре месяца с момента роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена на основаниях, предусмотренных [статьей 117](#) Конституции Российской Федерации, в течение года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена в момент выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации.

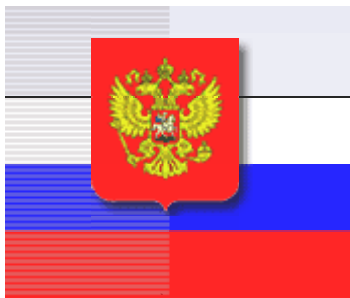


Алфавитно-предметный указатель

[А](#) [Б](#) [В](#) [Г](#) [Д](#) [Ж](#) [З](#) [И](#) [К](#) [Л](#) [М](#) [Н](#) [О](#) [П](#) [Р](#) [С](#) [Т](#) [У](#) [Ф](#) [Ц](#) [Ч](#) [Я](#)

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)



# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации



### Глава 6. Правительство Российской Федерации

#### Раздел I:

#### Глава 1

[Основы конституционного строя](#)  
(ст. 1-16)

#### Глава 2

[Права и свободы человека и гражданина](#)  
(ст. 17-64)

#### Глава 3

[Федеративное устройство](#)  
(ст. 65-79)

#### Глава 4

[Президент Российской Федерации](#)  
(ст. 80-93)

#### Глава 5

[Федеральное Собрание](#)  
(ст. 94-109)

#### Глава 6

[Правительство Российской Федерации](#)  
(ст. 110-117)

#### Глава 7

[Судебная власть](#)  
(ст. 118-129)

#### Глава 8

[Местное самоуправление](#)  
(ст. 130-133)

#### Глава 9

[Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#)  
(ст. 134-137)

#### Раздел II:

[Заключительные и](#)

#### Статья 110

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

#### Статья 111

1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после отставки Председателя Правительства Российской Федерации либо в течение недели дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

4. После трехкратного отклонения предложенной кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации и распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании положений части 4 статьи](#)*

#### Статья 112

1. Председатель Правительства Российской Федерации

**Справка**



позднее недельного срока после назначения представл Президенту Российской Федерации предложения о структ федеральных органов исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российской Федера предлагает Президенту Российской Федерации кандидатуры должности заместителей Председателя Правительс Российской Федерации и федеральных министров.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании ста 71 \(пункт "з"\), 76 \(часть 1\) и 112 \(част](#)*

**Статья 113**

Председатель Правительства Российской Федерации соответствии с Конституцией Российской Федерат федеральными законами и указами Президента Россиис Федерации определяет основные направления деятельно Правительства Российской Федерации и организует его работу

**Статья 114**

1. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет Государственной Д федеральный бюджет и обеспечивает его исполне представляет Государственной Думе отчет об исполне федерального бюджета;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации еди финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации еди государственной политики в области культуры, нау образования, здравоохранения, социального обеспечен экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью

д) осуществляет меры по обеспечению обороны стра государственной безопасности, реализации внешней полит Российской Федерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, пра свобод граждан, охране собственности и общественного поряд борьбе с преступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на н Конституцией Российской Федерации, федеральными закона указами Президента Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Россиис Федерации определяется федеральным конституционн законом.

## Статья 115

1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивая их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации.

## Статья 116

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия.

## Статья 117

1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства Российской Федерации либо распускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывается, Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до формирования нового Правительства Российской Федерации.

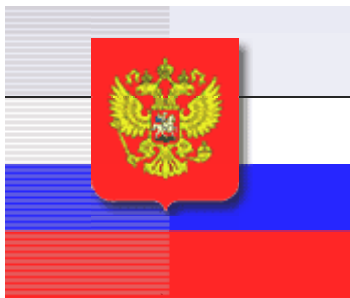


Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)





# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации

### Раздел I:

### Глава 7. Судебная власть

#### Глава 1

[Основы конституционного строя](#)  
(ст. 1-16)

#### Глава 2

[Права и свободы человека и гражданина](#)  
(ст. 17-64)

#### Глава 3

[Федеративное устройство](#)  
(ст. 65-79)

#### Глава 4

[Президент Российской Федерации](#)  
(ст. 80-93)

#### Глава 5

[Федеральное Собрание](#)  
(ст. 94-109)

#### Глава 6

[Правительство Российской Федерации](#)  
(ст. 110-117)

#### Глава 7

[Судебная власть](#)  
(ст. 118-129)

#### Глава 8

[Местное самоуправление](#)  
(ст. 130-133)

#### Глава 9

[Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#)  
(ст. 134-137)

### Раздел II:

[Заключительные и](#)

### Статья 118

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов допускается.

### Статья 119

Судьями могут быть граждане Российской Федерации достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.

### Статья 120

1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом.

### Статья 121

1. Судьи несменяемы.

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.

[Справка](#)



## Статья 122

1. Судьи неприкосновенны.

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом.

## Статья 123

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.

## Статья 124

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом.

## Статья 125

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей.

2. Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает запросы Президента Российской Федерации, Совета Федерации Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных



по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации.

4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и запросам судов проверяет конституционность закона примененного или подлежащего применению в конкретном деле в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации Государственной Думы, Правительства Российской Федерации органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствуют Конституции Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и](#)*

## **Статья 126**

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и](#)*

## **Статья 127**

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и](#)*

## **Статья 128**

1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом.

## **Статья 129**

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются

Генеральным прокурором Российской Федерации согласованию с ее субъектами.

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации.

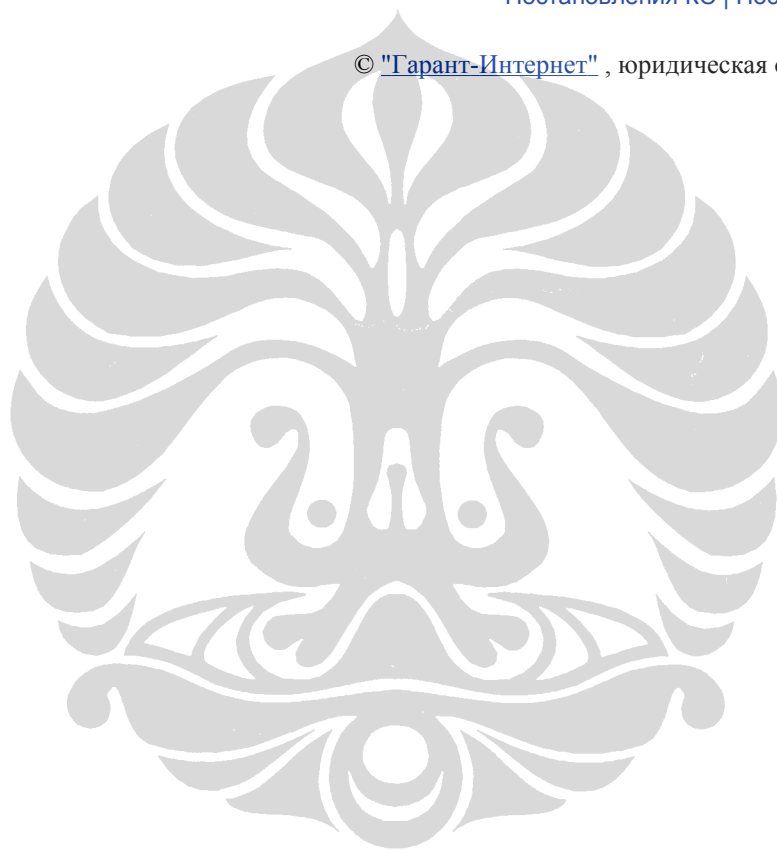
5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.

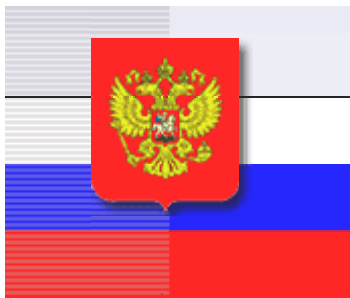


Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)





# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Поиск:

## Конституция Российской Федерации



### Раздел I:

### Глава 8. Местное самоуправление

#### Глава 1

[Основы конституционного строя](#)  
(ст. 1-16)

#### Глава 2

[Права и свободы человека и гражданина](#)  
(ст. 17-64)

#### Глава 3

[Федеративное устройство](#)  
(ст. 65-79)

#### Глава 4

[Президент Российской Федерации](#)  
(ст. 80-93)

#### Глава 5

[Федеральное Собрание](#)  
(ст. 94-109)

#### Глава 6

[Правительство Российской Федерации](#)  
(ст. 110-117)

#### Глава 7

[Судебная власть](#)  
(ст. 118-129)

#### Глава 8

[Местное самоуправление](#)  
(ст. 130-133)

#### Глава 9

[Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#)  
(ст. 134-137)

### Раздел II:

[Заключительные и](#)

#### Статья 130

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

#### Статья 131

1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий.

#### Статья 132

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями переданной им муниципальной собственностью. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

#### Статья 133

[переходные положения](#)

[Справка](#)



Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов возникших в результате решений принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами

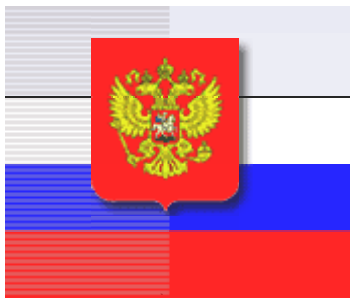


Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

Конституция | Оптическая копия | Государственные символы |  
Постановления КС | Постановление ВС



© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)



# КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поиск: 

## Конституция Российской Федерации



### Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции

#### Раздел I:

##### Глава 1

[Основы конституционного строя](#)  
(ст. 1-16)

##### Глава 2

[Права и свободы человека и гражданина](#)  
(ст. 17-64)

##### Глава 3

[Федеративное устройство](#)  
(ст. 65-79)

##### Глава 4

[Президент Российской Федерации](#)  
(ст. 80-93)

##### Глава 5

[Федеральное Собрание](#)  
(ст. 94-109)

##### Глава 6

[Правительство Российской Федерации](#)  
(ст. 110-117)

##### Глава 7

[Судебная власть](#)  
(ст. 118-129)

##### Глава 8

[Местное самоуправление](#)  
(ст. 130-133)

##### Глава 9

[Конституционные поправки и пересмотр Конституции](#)  
(ст. 134-137)

#### Раздел II: Заключительные и

#### Статья 134

Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

#### Статья 135

1. Положения [глав 1, 2 и 9](#) Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.

2. Если предложение о пересмотре положений [глав 1, 2](#) Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятими голосов от общего числа членов Совета Федерации депутатов Государственной Думы, то в соответствии федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов и выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, в нем приняло участие более половины избирателей.

#### Статья 136

Поправки к [главам 3 - 8](#) Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу по



их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании ста](#)*

## Статья 137

1. Изменения в [статью 65](#) Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона, принятого в Российской Федерации и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.

2. В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в [статью 65](#) Конституции Российской Федерации.

*[Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании части статьи](#)*



Алфавитно-предметный указатель  
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Я

[Конституция](#) | [Оптическая копия](#) | [Государственные символы](#) |  
[Постановления КС](#) | [Постановление ВС](#)

© "Гарант-Интернет", юридическая обработка: [НПП "Гарант-Сервис"](#)